

## **BAB III**

### **PEMIKIRAN POLITIK MENURUT ARISTOTELES**

#### **A. Rumah Tangga dan Negara Kota**

##### **1. Asosiasi Politis dan Hubungannya Dengan Asosiasi Lainnya**

Pengamatan menunjukkan kepada kita bahwa setiap negara kota (polis) adalah suatu spesies asosiasi dan semua asosiasi ada demi kebaikan tertentu karena semua orang melakukan semua tindakannya dengan maksud untuk mencapai sesuatu yang ia pandang baik. Oleh karena itu, jelaslah bahwa semua asosiasi ditujukan untuk suatu kebaikan, dan bahwa asosiasi khusus, yang paling tinggi dari segala asosiasi dan mencakup semua asosiasi lainnya, akan paling banyak mengejar kebaikan ini, dan dengan demikian, ia akan terarah kepada kebaikan yang paling tinggi dari segala kebaikan. Asosiasi yang paling tinggi dan bersifat inklusif ini ialah negara kota atau *polis*, sebagaimana ia disebut, atau asosiasi politis.

Sangat keliru mempercayai bahwa negarawan sama dengan *monarkus* (*monarch*) suatu kerajaan, atau manajer sebuah rumah tangga atau tuan (*master*) dari sejumlah budak. Orang yang menganut pandangan ini beranggapan bahwa masing-masing orang ini berbeda satu sama lain bukan dalam perbedaan jenis, tetapi dalam hal jumlah dan besar atau kecilnya orang yang diurus. Dalam pandangan ini, orang yang mengurus segelintir orang

adalah seorang tuan, orang yang mengurus lebih banyak adalah manajer rumah tangga, dan orang yang mengurus lebih banyak lagi juga manajer rumah tangga ialah seorang negarawan, atau seorang monarkus.<sup>43</sup> Pandangan ini menghilangkan setiap perbedaan nyata antara sebuah rumah tangga yang besar dengan sebuah kota kecil; dan ini juga menghilangkan perbedaan antara ‘negarawan’ dengan monarkus pada satu fakta bahwa yang belakangan mempunyai suatu otoritas yang tidak dikendalikan dan tunggal, sementara yang terdahulu menjalankan otoritasnya sesuai dengan aturan-aturan yang ditentukan oleh seni kenegarawanan dan sebagai orang yang memerintah, pada gilirannya ia juga diperintah, tetapi ini adalah pandangan yang tidak dapat diterima sebagai pandangan yang benar.

Maksud kita akan jelas jika kita mempertimbangkan lebih lanjut masalah itu menurut metode analisis kita yang wajar. Sebagaimana suatu penggabungan di semua bidang lain, harus dianalisis sampai kita menemukan unsur-unsurnya yang sederhana (atau dengan kata lain, bagian-bagian terkecil dari keseluruhan yang menyusunnya), begitu pulalah kita harus mempertimbangkan secara analitis unsur-unsur yang membentuk sebuah kota. Kemudian kita akan memperoleh suatu wawasan yang lebih baik mengenai hal-hal yang membedakan yang satu dengan lainnya; dan kita juga akan mempunyai kesempatan untuk menemukan apakah ada suatu jenis

---

<sup>43</sup>Aristoteles, *Politik*, ter. Saut pasaribu (Yogyakarta: Narasi, 2017),... hlm. 1-2.

keahlian khusus yang diperoleh berhubungan dengan persoalan-persoalan yang sedang didiskusikan.<sup>44</sup>

Dalam bidang ini, seperti dalam bidang lain, kita akan dapat mempelajari pokok persoalan kita dengan baik jika kita memulai dari awal dan mempertimbangkan hal-hal dari proses pertumbuhannya. Pertama-tama, harus ada suatu persatuan antara orang-orang yang tidak dapat eksis tanpa satu sama lain. Laki-laki dan perempuan harus bersatu untuk mengembang biakkan spesiesnya dan meninggalkan sesuatu yang sama hakikatnya dengan diri mereka sendiri bukan karena maksud yang disengaja tetapi karena dorongan alamiah yang ada pada hewan pada umumnya juga pada tumbuhan. Kemudian, harus ada persatuan antara unsur yang sewajarnya menguasai dengan unsur yang sewajarnya dikuasai demi kelestarian keduanya. Unsur yang mampu melakukan pemikiran ke masa depan, karena kecerdasannya, sewajarnya adalah unsur yang memerintah dan tuan; unsur yang dapat melakukan pekerjaan fisik, karena kekuatan ragawinya, ia adalah unsur yang diperintah, yang sewajarnya menjalani perbudakan, oleh karena itu, tuan dan budak mempunyai kepentingan bersama.

Perempuan dan budak secara alamiah dibedakan satu dengan yang lain. Alam tidak menghasilkan jiwa yang kikir (*miserly*), seperti yang dilakukan para pandai besi ketika mereka membuat pisau Delfik untuk melayani sejumlah tujuan. Alam membuat tiap hal terpisah untuk tujuan yang terpisah dan ia berbuat begitu karena sebuah instrumen menjadi paling

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm. 2.

sempurna ketika ia melayani suatu maksud tunggal dan bukan maksud yang bermacam-macam. Akan tetapi, di kalangan orang-orang barbar, perempuan dan budak menempati posisi yang sama, alasannya ialah bahwa tidak ada unsur yang sewajarnya memerintah di kalangan mereka, oleh karena itu persatuan perkawinan menjadi suatu persatuan seorang budak perempuan dengan seorang laki-laki yang juga budak.<sup>45</sup>

Bentuk asosiasi berikutnya yang juga dibentuk pertama kali dan rumah tangga yang berjumlah lebih dari satu, untuk pemenuhan sesuatu yang lebih daripada sekedar kebutuhan-kebutuhan sehari-hari yang berulang adalah desa. Tampaknya, bentuk desa yang paling alamiah ialah perkampungan (atau cabang) dan sebuah keluarga, oleh karena itu ada orang yang menyebut anggota-anggota desa itu dengan nama “saudara sepersusuan” atau “anak dan anaknya si anak”. Dapat dicatat, inilah sebabnya mengapa kota yang mula-mula, seperti yang masih berlangsung di dunia orang-orang barbar, diperintah oleh raja. Kota-kota itu dulu dibentuk oleh bangsa yang sudah diperintah secara monarki, karena setiap rumah tangga diperintah secara monarki oleh keluarga ia juga diperintah berdasarkan kekerabatan di kalangan anggotanya. Inilah yang dilukiskan Homer: Masing-masing dari mereka memerintah atas anak dan istrinya. Sebuah cuplikan yang menunjukkan bahwa mereka hidup dalam kelompok yang terpencar-pencar, seperti umumnya dilakukan manusia di zaman kuno. Fakta bahwa manusia pada umumnya diperintah oleh para raja di zaman kuno dan bahwa sebagian masih terus diperintah dengan cara

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm. 3-4.

demikian itulah yang menyebabkan setiap orang mengatakan bahwa para dewa juga diperintah oleh seorang raja. Manusia membuat kehidupan para dewa mirip dengan kehidupan mereka sendiri, sebagaimana mereka membentuk keadaannya.

Ketika kita sampai pada asosiasi yang terakhir dan sempurna, yang terbentuk dari sejumlah desa, kita sudah mencapai kota atau *polis*. Kota ini dapat dikatakan telah mencapai puncak swasembada (*self-sufficiency*) penuh atau lebih tepatnya kita dapat mengatakan bahwa sementara ia ada demi kehidupan semata juga kehidupan yang baik. Oleh karena alasan ini setiap kota ada secara alamiah, sebagaimana asosiasi-asosiasi yang lebih awal (dari mana ia tumbuh). Kota adalah tujuan dan kesempurnaan yang dituju asosiasi-asosiasi tersebut. Hakikat benda-benda terkandung di dalam tujuan atau kesempurnaannya, karena apakah tiap benda tatkala pertumbuhan sudah lengkap, itulah yang kita sebut hakikatnya, entah ia seorang manusia, seekor kuda juga sebuah keluarga. Tujuan atau sebab final yang terbaik dan mencukupi diri sendiri adalah tujuan yang terbaik.<sup>46</sup>

Pertimbangan ini menjelaskan bahwa kota termasuk pada kelompok benda yang berada secara alamiah, dan bahwa manusia secara alamiah adalah hewan politis (*political animal*). Orang yang hidup tanpa sebuah kota karena wataknya sendiri dan bukan karena kecelakaan tertentu adalah seorang makhluk yang malang atau lebih tinggi daripada manusia.

---

<sup>46</sup> Aristoteles, *Politik*,... hlm. 5.

Dengan demikian, jelaslah bahwa manusia adalah seekor hewan politis di dalam derajat yang lebih tinggi daripada lebah atau hewan-hewan lainnya yang suka berkelompok. Alam menurut teori kita tidak membuat sesuatu yang sia-sia, dan manusia adalah satu-satunya hewan yang dilengkapi dengan kemampuan bahasa. Membuat suara-suara yang hanya membantu menunjukkan rasa senang dan rasa sakit adalah kemampuan yang dimiliki hewan pada umumnya, kodratnya memungkinkan ia mencapai titik yang mempunyai persepsi atas kesenangan dan kepedihan, dan dapat memberitahukan persepsi itu kepada yang lain. Tetapi bahasa membantu untuk menyatakan apa yang menguntungkan dan apa yang sebaliknya, dan itu khas bagi manusia, dibandingkan dengan binatang lainnya, sehingga ia sendiri mempunyai persepsi atas yang baik dan buruk, atas yang adil dan tidak adil juga kualitas-kualitas serupa lainnya, dan asosiasi dalam hal-hal inilah yang membuat suatu keluarga dan sebuah kota.<sup>47</sup>

Sekarang kita dapat meneruskan dengan menambahkan bahwa kota dalam urutan hakikat mendahului keluarga dan individu. Alasan untuk ini ialah bahwa keseluruhan niscaya lebih dahulu daripada bagian. Jika seluruh tubuh hancur tidak akan ada kaki atau tangan, kecuali dalam arti yang taksa dimana orang menggunakan kata yang sama untuk menunjukkan hal yang berbeda, seperti ketika orang berbicara tentang “tangan” yang terbuat dari batu; karena sebuah tangan, ketika dirusak (melalui penghancuran seluruh badan), tidak lebih baik daripada sebuah “tangan yang terbuat dari batu”.

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 6.

Semua benda memperoleh karakter esensialnya, fungsi dan kapasitasnya, dan oleh karena itu jika mereka tidak lagi cocok untuk menjalankan fungsinya, kita tidak boleh mengatakan bahwa ia masih hal yang sama, kecuali dengan ketaksamaan, ia masih mempunyai nama yang sama.

Dengan demikian, kita melihat bahwa kota ada secara alamiah dan ia lebih dahulu daripada individu. Karena jika individu tidak swasembada ketika ia terisolasi dalam hubungannya dengan keseluruhan, ia akan berada dalam hubungan yang sama sebagaimana bagian-bagian dengan keseluruhannya. Manusia yang terisolasi, yang tidak mampu berbagi keuntungan dalam asosiasi politis, atau tidak perlu berbagi karena ia sudah swasembada, bukanlah bagian dari kota, dan karena itu pastilah ia seekor binatang buas atau seorang dewa. Oleh karena itu, ada suatu dorongan alamiah yang terdapat pada manusia ke arah asosiasi jenis ini. Tetapi orang yang pertama membangun asosiasi semacam itu adalah yang terbesar dan semuanya berasal dari golongan dermawan. Manusia, bila ia disempurnakan, adalah yang terbaik dari binatang, tetapi jika ia terisolasi dari hukum dan keadilan, ia adalah yang terburuk dari segalanya. Ketidakadilan adalah yang paling gawat ketika ia merupakan ketidakadilan yang bersenjata; dan manusia sejak lahirnya dilengkapi dengan senjata-senjata yang dimaksudkan untuk melayani maksud-maksud kebijaksanaan dan kebaikan, tetapi dapat digunakan untuk tujuan-tujuan yang sebaliknya. Oleh karena itulah, jika ia tanpa kebaikan (atau jiwa dan karakter), ia adalah makhluk yang paling busuk dan ganas juga lebih buruk daripada semua makhluk lain dalam kegemarannya pada nafsu

dan kerakusan. Kebajikan dan keadilan adalah milik kota; karena keadilan adalah suatu penataan asosiasi politis, dan kebajikan juga keadilan terletak pada penentuan apa yang adil.<sup>48</sup>

## **2. Asosiasi Rumah Tangga dan Faktor-faktornya yang berbeda**

### **a. Unsur-unsur pembentuk rumah tangga**

Setelah diketahui dari analisis sebelumnya, apa unsur-unsur yang membentuk kota, pertama-tama kita harus mempertimbangkan pengelolaan rumah tangga; karena setiap kota terdiri dari rumah tangga-rumah tangga. Bagian dari pengelolaan rumah tangga akan berhubungan dengan bagian yang membentuk rumah tangga itu sendiri. Sebuah rumah tangga yang lengkap terdiri dari para budak dan orang bebas. Tetapi setiap topik penelitian harus dikaji terlebih dahulu di dalam unsur-unsurnya yang paling sederhana; dan unsur-unsur rumah tangga yang utama dan paling sederhana adalah hubungan tuan dengan budak, hubungan suami dengan istri, dan hubungan orang tua dengan anak. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan tiap hubungan ini, mengkaji hakikat masing-masing dan kualitas yang harus dimiliki. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dikaji ada tiga, pertama, hubungan tuan dengan budak; berikutnya, apa yang dapat disebut hubungan perkawinan kemudian hubungan orang tua. Tetapi di samping tiga faktor yang menampilkan dirinya untuk dikaji, ada juga faktor keempat yang sebagian orang menganggapnya identik dengan keseluruhan pengelolaan rumah tangga, dan sebagian lagi menganggapnya sebagai bagiannya yang prinsipil.

---

<sup>48</sup> Aristoteles, *Politik*,... hlm. 6-7.

Inilah unsur yang disebut “seni pemerolehan”, dan kita harus mempertimbangkan hakikatnya.

## **b. Perbudakan**

Harta benda adalah bagian dari rumah tangga dan seni memperoleh harta benda adalah bagian dari pengelolaan rumah tangga, karena tidak mungkin hidup dengan baik, jika syarat-syarat yang diperlukan tidak tersedia.<sup>49</sup> Demikianlah hal yang sama juga berlaku di lingkungan pengelolaan rumah tangga seperti yang berlaku di dalam keahlian yang terspesialisasi, masing-masing harus dilengkapi dengan instrumen-instrumen yang sesuai jika fungsinya hendak dipenuhi. Instrumen-instrumen sebagian tidak berjiwa dan sebagian berjiwa. Misalnya Nahkoda sebuah kapal mempunyai instrumen tidak berjiwa pada kemudi, dan instrumen berjiwa pada manusia yang mengawasinya (karena di dalam keahlian-keahlian itu seorang bawahan (*subordinate*) pada hakikatnya adalah sebuah instrumen). Tiap harta benda adalah suatu instrumen bagi tujuan kehidupan, dan harta benda secara umum adalah kumpulan instrumen tersebut. Budak adalah sebuah barang berjiwa para pelayan yang umumnya dapat digambarkan sebagai instrumen-instrumen yang lebih utama daripada instrumen lainnya. Kita dapat membayangkan suatu situasi di mana setiap instrumen dapat mengerjakan pekerjaannya sendiri atas perkataan atau perintah atau atas antisipasi cerdas, seperti patung-patung Daedalus atau penopang berkaki tiga yang dibuat oleh Hephaestus, yang disebut-sebut sang penyair bahwa: Dengan gerakannya sendiri

---

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm. 8-9.

mereka memasuki pertemuan pribadi Para Dewa di Olympus. Sebuah puntalan menenun sendiri, dan alat pemetik harpa memainkan sendiri harpa itu. Dalam situasi ini para pengelola tidak akan membutuhkan bawahan dan para tuan tidak akan membutuhkan budak.

Instrumen-instrumen yang baru saja kita bicarakan adalah instrumen-instrumen produksi; tetapi harta benda adalah suatu instrumen tindakan. Dari puntalan keluarlah sesuatu yang berbeda, dan berada secara terpisah dari tindakan langsung pemakaiannya; tetapi pakaian atau ranjang yang muncul hanyalah satu fakta kegunaannya. Kita dapat menambahkan bahwa, karena produksi dan tindakan berbeda jenisnya, dan keduanya membutuhkan instrumen juga instrumen pasti menunjukkan suatu perbedaan yang sepadan. Kehidupan adalah suatu tindakan dan bukan produksi; dan oleh karena itu budak adalah seorang pelayan di lingkungan tindakan. Istilah “barang milik” digunakan dengan cara yang sama dengan istilah “bagian”. Suatu bagian bukan hanya bagian dari sesuatu yang lain dan dirinya sendiri tapi juga kepunyaan yang lain itu sama halnya dengan sebuah barang milik. Oleh karena itu, sementara sang tuan hanyalah tuan dari sang budak, dan bukan kepunyaannya, maka budak bukan hanya budak tuannya; ia juga seluruh kepunyaan tuannya.<sup>50</sup>

Dia menggambarkan budak alamiah sebagai orang “yang secara alamiah bukan milik dirinya melainkan milik orang lain”. Dia adalah orang yang inferior secara intelektual dan memiliki kekurangan dalam kebijakan atau keputusan praktis sehingga tidak bisa memimpin dirinya.”Orang yang berpartisipasi dalam

---

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 9-11.

prinsip rasional dan bisa memahami namun tidak memiliki prinsip tersebut adalah budak secara alamiah.” Individu semacam ini tidak bisa bertindak secara rasional atas inisiatifnya sendiri; dia memerlukan arahan dan bimbingan orang lain jika ingin hidup secara benar. Dia mencapai perkembangan mental dan moral tertingginya yang dia mampu bukan ketika bebas berbuat sesuatu namun ketika dia menempati posisinya dari sebagai budak menjadi majikan yang dihormati.

Sebagaimana petani dan mekanik menyediakan sarana material yang menjamin waktu luang bagi kelas warga negara, budak membebaskan majikan dari melakukan tugas-tugas kasar yang tercampur dengan tambahan kebijakan. Aristoteles berpendapat bahwa jika tubuh diperintah oleh jiwa adalah baik, maka tidak ada alasan untuk menolak bahwa budak memiliki kebaikan dalam hal ia diperintah oleh majikan. Orang ini tidak salah dengan hilangnya kebebasan sehingga ia tidak mampu menggunakan kebebasan secara benar. Pandangan mengenai budak alamiah ini tidak mengimplikasikan inferioritas atau ketidaksetaraan yang disebabkan oleh ras atau status sosial. Ini didasarkan atas gagasan bahwa ada banyak orang yang “atas kepemilikan mereka sendiri” tidak mampu memberikan kontribusi untuk kebaikan umum.<sup>51</sup>

Jenis perbudakan kedua yang dikemukakan Aristoteles muncul atas dasar hukum atau konvensi. Perbudakan jenis ini meliputi tawanan perang, penundukan suatu ras tertentu menjadi pelayan, dan pelembagaan perbudakan seperti yang terjadi di bagian selatan Amerika Serikat sebelum tahun 1865. Aristoteles menganggap perbudakan jenis ini tidak adil karena didasarkan atas kekuatan atau

---

<sup>51</sup>Henry J Schmandt, *Filsafat Politik (Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern)* ter. Ahmad Baidlowi dan Imam Bahehaqi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 106-107.

bukan alamiah. Banyak di antara budak-budak tersebut yang memiliki keputusan rasional, bahkan banyak di antara mereka yang secara intelektual dan dalam hal kebaikan melebihi kemampuan majikannya. Kebudakan mereka yang terjadi akibat perang atau melalui pembelian hanya bisa dibenarkan apabila secara watak memang budak.

Aturan majikan “bukanlah suatu aturan yang konstitusional”. Budak yang sesungguhnya tidak memiliki hak, dia berada dibawah aturan despotik (penguasa tunggal yang berbuat sekehendak hatinya/ kepala negara atau raja yang menjalankan kekuasaan dengan sewenang-wenang) . Bagaimanapun, sebagai manusia dia berhak untuk memperoleh perlindungan komunitas politik dari perlakuan kejam dan penganiayaan. Ada beberapa analogi yang berkaitan dengan praktik dalam demokrasi modern dimana mereka yang secara mental dihukum tidak mampuitu dihalangi dari partisipasinya dalam urusan publik dan bahkan dari upaya mengurus milik mereka sendiri. Aristoteles menegaskan bahwa majikan memperlakukan budaknya dengan baik dan bijak. Penyimpangan terhadap otoritasnya akan melukai kedua belah pihak, sebab kepentingan sebagian atau semua juga kepentingan tubuh atau jiwa adalah sama, meskipun demikian, dimana relasi majikan dan budak bersifat alamiah, mereka adalah sahabat dan memiliki kepentingan bersama, namun ketika relasi mereka hanya didasarkan hukum dan kekuatan maka yang benar adalah sebaliknya. Sementara itu mungkin ada beberapa justifikasi teoretik bagi posisi Aristoteles, kesulitannya terletak pada persoalan mengetahui siapa yang seharusnya menjadi budak dan siapa yang bebas, dan siapa pula yang harus mengambil keputusan. Kenyataannya tetap

bahwa kapan pun dan dimana pun terjadi perbudakan, hal itu pasti terjadi karena kekuatan, tradisi, fungsi, dan bukan atas dasar pembedaan majikan.<sup>52</sup>

Pemerintahan tuan dan pemerintahan negarawan berbeda satu sama lain, dan tidak benar bahwa semua jenis pemerintahan, seperti yang diyakini sebagian pemikir itu identik. Jenis pemerintahan yang satu dijalankan terhadap orang yang bebas secara alamiah; jenis lainnya terhadap para budak; dan pemerintahan yang dijalankan atas sebuah rumah tangga oleh kepalanya adalah pemerintahan seorang monarkus (karena semua rumah tangga diperintah secara monarkis), sementara itu pemerintahan sang negarawan adalah pemerintahan atas manusia bebas dan sederajat. Sekarang para tuan tidak dipandang berdasarkan pengetahuan yang telah mereka peroleh, tetapi berdasarkan bakat mereka sendiri; dan hal yang sama berlaku bagi para budak dan manusia pada umumnya. Mungkin ada suatu jenis pengetahuan yang menjadi milik para tuan, dan jenis lain yang menjadi milik para budak, dan yang terakhir adalah jenis hakikat pengetahuan yang diajarkan oleh orang Syracuse, yang memberi petunjuk kepada para abadinya untuk melaksanakan tugas-tugas keseharian mereka. Petunjuk dalam soal-soal itu mungkin dapat diperluas lebih lanjut, misalnya: seni memasak dan bentuk pelayanan terampil rumah tangga lainnya yang sama. Alasan mengapa hal ini dapat dilakukan ialah bahwa tugas-tugas itu berbeda; sebagian orang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, meskipun orang lain lebih diperlukan. Seperti dikatakan peribahasa: Budak dapat memimpin budak, dan tuan dapat memimpin tuan.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm. 107-108.

<sup>53</sup>Aristoteles, *Politik*,... hlm. 18.

Semua bentuk pengetahuan tersebut diperlukan oleh orang yang berwatak budak. Tetapi ada juga suatu bentuk pengetahuan yang merupakan milik sang tuan, yang tergantung pada pemakaian para budak: dalam hal ini seorang tuan tidak memperoleh budak, tetapi menggunakan para budak. Pengetahuan ini dimiliki oleh tuan yang tidak mempunyai watak mulia, tuan hanya perlu mengetahui bagaimana memerintahkan apa yang harus diketahui sang budak untuk dilakukan. Inilah sebabnya mengapa orang yang berusaha menjauhkan diri dari kesulitan itu menyerahkan pengelolaan seorang budak kepada seorang, lalu menghabiskan waktu yang dapat mereka selamatkan untuk politik atau filsafat. Seni mendapatkan budak untuk dimiliki berbeda dan seni menjadi seorang tuan juga seorang budak, yaitu bila dilaksanakan dengan adil; karena dalam kasus itu ia adalah suatu bentuk khusus dari seni berperang, atau seni berburu. Ini akan menjadi suatu penjelasan yang memadai atas pembedaan antara tuan dengan budak.

## **B. Penggolongan Bentuk Negara dan Pemerintahan**

Aristoteles merupakan murid Plato, tetapi pemikiran filsafatnya tentang negara itu berbeda, dimana bila Plato filsafatnya ideal, sedangkan Aristoteles menganut filsafat yang realis. Demikian pula uraiannya tentang bentuk negara dan pemerintahan, Plato: filosofis-idealistis, sedangkan Aristoteles: empiris-induktif. Dalam menerangkan tentang bentuk negara dan pemerintahan itu ia

terlebih dahulu mengadakan penyelidikan terhadap 158 buah konstitusi *Polis* Yunani yang pernah ada dan masih ada pada zamannya.<sup>54</sup>

Aristoteles membuat klasifikasi bentuk pemerintahan. Kriteria atau dasar penilaian yang digunakan adalah:

1. Jumlah orang yang berkuasa (duduk dalam pemerintahan).
2. Cara dan kepentingan dalam menjalankan kekuasaan pemerintah.

Mengenai jumlah orang yang berkuasa atau memegang tampuk pemerintahan, terdapat tiga macam pembagian, yaitu pemerintahan oleh satu orang (*government by one*), pemerintahan oleh sekelompok orang (*government by few*), dan pemerintahan oleh banyak orang (*government by the many*). Masing-masing dari ketiga macam pembagian itu diberi klasifikasi antara bentuk yang baik (positif) dengan bentuk yang buruk (negatif). Sehingga seluruhnya terdapat enam bentuk pemerintahan. Hal baik atau buruknya suatu pemerintahan, ditinjau dari segi cara dan kepentingan dalam menjalankan. Jika pemerintahan itu dijalankan dengan diabdikan untuk kepentingan umum atau masyarakat, maka disebut sebagai bentuk yang baik. Sebaliknya, jika diabdikan untuk kepentingan pribadi atau kelompok maka disebut bentuk yang buruk.

Pemerintahan oleh satu orang, jika diabdikan untuk kepentingan umum disebut Monarki, sedangkan jika diabdikan untuk kepentingan pribadi disebut Tirani. Pemerintahan oleh sekelompok atau beberapa orang, jika mengabdikan untuk

---

<sup>54</sup>I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 126.

kepentingan masyarakat umum disebut Aristokrasi. Sebaliknya disebut Oligarki jika mengabdikan untuk kepentingan kelompok saja. Pemerintahan oleh banyak orang, jika diabdikan untuk kepentingan bersama bagi banyak orang (termasuk yang diwakili aspirasinya, karena tidak langsung duduk dalam pemerintahan) disebut Demokrasi, sedangkan dalam bentuk yang buruk (negatif) dari pemerintahan oleh banyak orang, yaitu jika keikutsertaan banyak orang itu digunakan untuk berkelahi disebut Mobokrasi. Mobokrasi, sebagai bentuk lawan dari demokrasi ini, menurut istilah asli dari Aristoteles disebut “*polity*”.<sup>55</sup>

Untuk lebih jelasnya mengenai apa yang dimaksud dengan bentuk negara dan Pemerintahan seperti diatas, dibawah ini dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Monarki

Berasal dari kata Yunani *monos* yang berarti satu dan *archein* yang berarti memerintah atau menguasai. Oleh karena itu monarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipimpin oleh seseorang yang berusaha mewujudkan kesejahteraan umum. Idealnya menurut Aristoteles, monarki sebagai negara ideal karena dipimpin oleh seorang filosof yang arif dan bijaksana yang kekuasaannya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, Aristoteles menyadari bahwa monarki nyaris tidak mungkin ada dalam realitas, ia hanya refleksi gagasan normatif yang sulit terealisasi dalam dunia empiris.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Teuku May Rudy, *Pengantar Ilmu Politik: Wawasan pemikiran dan kegunaannya*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2013), hlm. 31-32.

<sup>56</sup> Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 46.

2. Tirani

Bentuk pemerintahan yang seluruh kekuasaannya dipegang oleh satu orang yang berusaha mewujudkan kepentingannya sendiri dan tidak memperdulikan kesejahteraan umum.

3. Aristokrasi

Berasal dari bahasa Yunani *aristoi* yang berarti kaum bangsawan atau cendekiawan dan *kratein* yang berarti kekuasaan. Jadi Aristokrasi berarti: bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh beberapa filosof yang berusaha mewujudkan kesejahteraan umum.

4. Oligarki

Berasal dari kata *oligoi* yang berarti beberapa dan *archien* yang berarti pemerintahan. Oligarki berarti bentuk pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang yang mengutamakan kepentingan golongannya sendiri.

5. Polity

Polity ialah bentuk pemerintahan yang warga negaranya turut serta untuk mengatur negara dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan umum.

6. Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat, dan *kratein* yang berarti memerintah. Jadi demokrasi berarti pemerintahan yang dipegang oleh rakyat.<sup>57</sup>

| Pemerintahan oleh | Bentuk Baik | Bentuk Buruk |
|-------------------|-------------|--------------|
|-------------------|-------------|--------------|

---

<sup>57</sup>I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*,...hlm. 127-128.

|                  |             |                  |
|------------------|-------------|------------------|
| Satu orang       | Monarki     | Tirani           |
| Sekelompok orang | Aristokrasi | Oligarki         |
| Banyak orang     | Demokrasi   | Polity/Mobokrasi |

### C. Prinsip-prinsip Oligarki, Demokrasi dan Hakikat Keadilan Distributif

Kita harus menegaskan apa yang dikatakan sebagai prinsip-prinsip khas oligarki dan demokrasi, dan apa konsepsi keadilan oligarki dan demokrasi. Semua pihak berpegang pada suatu jenis konsepsi keadilan; tetapi mereka sama-sama gagal untuk melaksanakannya lebih jauh, dan tidak mengungkapkan konsepsi keadilan yang sejati di segenap jajarannya. Sebagai contoh, keadilan dianggap berarti kesamaan. Ia memang berarti kesamaan tetapi kesamaan bagi orang-orang yang sama, dan bukan bagi semua orang. Lagipula, ketidaksamaan dianggap adil; dan memang demikian, tetapi hanya bagi orang yang tidak sama, dan bukan bagi semua orang. Orang-orang ini gagal mempertimbangkan untuk siapa kesamaan atau ketidaksamaan itu ada dan karena itu mereka membuat keputusan-keputusan yang keliru, hal ini disebabkan karena mereka menilai demi kepentingannya sendiri.<sup>58</sup>

Keadilan itu berkaitan dengan masyarakat, dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang di dalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran distribusi. Ada kesepakatan umum tentang apa yang membentuk kesamaan di dalam benda, tetapi terdapat ketidaksepakatan tentang apa yang membentuknya di dalam masyarakat, ini

<sup>58</sup>Aristoteles, *Politik*,... hlm. 123.

dikarenakan mereka menilai dengan penilaian yang keliru untuk tujuan demi kepentingan mereka sendiri kemudian mereka juga mengajukan suatu konsepsi keadilan dan mengajukannya hingga pada suatu titik tertentu, sampai beranggapan bahwa mereka mengajukan suatu konsepsi yang bersifat mutlak dan lengkap. Sebagian orang mengira bahwa jika mereka unggul dalam suatu hal, misalnya dalam kekayaan, mereka unggul dalam segala hal kemudian yang lain percaya bahwa jika mereka sama dalam satu hal, misalnya dalam kelahiran yang bebas itu mereka sama di segala bidang.

Jika harta benda adalah tujuan yang membuat orang bergabung dan membentuk suatu asosiasi, bagian seseorang di dalam kota akan sebanding dengan bagian seseorang di dalam harta benda, dan dalam masalah ini argumen dari sudut oligarki akan tampak kuat: mereka mengatakan bahwa tidak adil bagi seseorang yang telah menyumbangkan satu mina pada saham yang berjumlah seratus mina itu diperlakukan sama dengan orang yang menyumbangkan semua sisanya dan hal ini diterapkan baik pada jumlah semula maupun pada bunga yang bertambah padanya, akan tetapi tujuan kota bukanlah sekedar hidup; lebih tepatnya ia bertujuan untuk mencapai suatu kualitas kehidupan yang baik.<sup>59</sup>

Dalam semua cabang pengetahuan, tujuan yang diinginkan ialah kebaikan. Yang paling tinggi dalam hal ini, kecakapan untuk (kepemimpinan di dalam) masalah-masalah politis, tujuan yang diinginkan ialah kebaikan yang terbesar dan yang paling dikejar ialah kebaikan. Kebaikan dalam lingkup politik adalah keadilan; dan keadilan terdapat pada apa yang cenderung memajukan

---

<sup>59</sup>*Ibid*, hlm. 123-124.

kepentingan umum. Pendapat umum membuatnya terdapat pada sejenis kesamaan. Hingga pada titik tertentu, hal ini sesuai dengan penelitian-penelitian filosofis yang memuat kesimpulan-kesimpulan kita mengenai etika. Dengan kata lain, penelitian itu menganggap bahwa keadilan meliputi dua faktor: benda-benda dan orang yang padanya benda-benda diberikan, dan ia menganggap bahwa orang-orang yang sama kepadanya harus diberi benda-benda yang sama. Tetapi disini muncul suatu pertanyaan yang tidak boleh diabaikan, orang-orang yang sama dan tidak sama dalam hal apa? Ini adalah sebuah pertanyaan yang memunculkan kesulitan-kesulitan, dan melibatkan kita di dalam spekulasi filosofis mengenai politik. Mungkinkah untuk berargumen bahwa jabatan-jabatan dan kehormatan harus didistribusikan secara tidak sama berdasarkan superioritas di dalam segala jenis kebaikan, meskipun hal-hal yang terkait itu serupa di dalam segala hal. Alasannya ialah bahwa dimana ada orang yang berbeda satu sama lain itu di sana pasti ada suatu perbedaan dalam apa yang adil dan sepadan dengan jasa-jasa mereka. Jika argumen ini benar, fakta belaka akan ciri umum yang lebih baik, tinggi badan yang lebih unggul, dan keuntungan yang semacam itu, akan mengukuhkan suatu klaim untuk bagian yang lebih besar dalam hak-hak politis yang diberikan kepada pemiliknya. Tetapi bukankah argumen itu jelas-jelas salah? Untuk memperjelas hal ini, kita hanya perlu mempertimbangkan jenis-jenis pengetahuan dan kecakapan yang lain. Dalam berurusan dengan sejumlah pemain seruling yang sama-sama ahlinya, Anda jangan memberikan sumbangan seruling yang lebih baik kepada orang yang kelahirannya lebih baik.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm. 135-136.

Lebih tepatnya ialah orang yang lebih baik dalam pekerjaan itu harus diberikan sumbangan peralatan yang lebih baik. Jika masalah kita belum jelas, dapat diperjelas jika kita membahasnya sedikit lebih jauh. Marilah kita menduga seseorang lebih unggul daripada orang lain dalam memainkan seruling, tapi jauh lebih rendah dalam kelahiran dan keindahan rupa. Meskipun kelahiran dan keindahan rupa adalah kebaikan yang lebih besar daripada kemampuan meniup seruling, dan meskipun orang yang memiliki kedua hal itu dapat melebihi pemain seruling secara proporsional di dalam kualitas-kualitas ini dibandingkan peniup seruling melebihi mereka di dalam permainan serulingnya, fakta masih tetap bahwa si peniup seruling adalah orang yang harus memperoleh seruling yang unggul. Keunggulan, entah itu dalam kelahiran atau kekayaan, harus menyumbangkan sesuatu untuk pelaksanaan fungsi itu; dan disini kualitas-kualitas ini tidak menyumbangkan apapun bagi pelaksanaan hal semacam itu.

Ada suatu keberatan lebih lanjut. Jika kita menerima argumen ini, maka setiap kualitas harus sepadan dengan setiap kualitas lain. Anda akan mulai dengan menganggap suatu derajat tertentu, misalnya: tinggi badan lebih unggul daripada derajat tertentu dan kualitas yang lain, dan dengan demikian anda akan didorong untuk mengadu tinggi badan dengan kekayaan dan kelahiran secara umum. Tetapi berdasarkan hal ini, yaitu bahwa di dalam kasus tertentu, A dianggap lebih unggul dalam hal tinggi badan daripada yang dipunyai B di dalam kebaikan, dan bahwa secara umum tinggi badan dianggap melebihi sampai pada suatu derajat yang lebih besar daripada yang dipunyai kebaikan, karena jika jumlah X dari kualitas tertentu lebih baik daripada jumlah Y dan kualitas lain

dengan jumlah tertentu selain daripada X jelaslah pasti sama dengan Y, yaitu pasti sama-sama baik, dan ini merupakan hal yang mustahil. Oleh karena itu, jelas bahwa di dalam masalah politis itu tidak ada alasan yang baik untuk mendasarkan suatu klaim penggunaan otoritas pada setiap jenis keunggulan. (Sebagian orang mungkin tangkas dan sebagian lain lambat; tetapi hal ini bukan alasan mengapa orang tertentu mempunyai lebih banyak otoritas dan orang lain mempunyai lebih sedikit, di dalam lomba atletik dan keunggulan ketangkasan dalam menerima hadiahnya). Klaim-klaim harus didamaikan pada unsur-unsur yang membentuk keberadaan sebuah kota.

Dengan demikian, ada dasar-dasar yang baik untuk klaim-klaim kehormatan yang dibuat oleh orang yang berasal dari keturunan yang baik, kelahiran yang bebas, dan orang kaya, karena orang-orang yang memegang jabatan pasti orang bebas dan membayar pajak kekayaan. Sebuah kota tidak mungkin terdiri hanya dari orang-orang yang tidak mempunyai kekayaan, dan selain daripada itu bisa terdiri dari orang-orang yang seluruhnya budak. Akan tetapi, kita harus menambahkan bahwa jika kekayaan dan kelahiran yang bebas adalah unsur-unsur yang penting, maka kualitas-kualitas sebagai seorang serdadu yang adil dan baik adalah juga unsur yang penting. Hal ini juga merupakan unsur-unsur yang harus ada jika orang ingin tinggal bersama di dalam sebuah kota. Perbedaannya ialah bahwa dua unsur yang pertama perlu bagi keberadaan

yang sederhana dan sebuah kota, dan dua unsur yang terakhir adalah demi kehidupannya yang baik.<sup>61</sup>

#### **D. Kerajaan dan Bentuk-bentuknya**

Kita harus mulai dengan menentukan apakah yang ada hanya satu jenis kerajaan, atau apakah ia mempunyai beberapa varietas. Jenis kerajaan yang ditentukan di dalam konstitusi Sparta dianggap sebagai contoh terbaik kerajaan yang berada di bawah hukum. Tetapi ia tidak meliputi kedaulatan umum: seorang raja Sparta mempunyai tanggung jawab dalam masalah-masalah militer hanya ketika ia pergi ke luar negeri kemudian urusan religius juga diserahkan kepada raja. Bentuk kerajaan ini seperti jabatan jenderal dengan komando absolut dan masa jabatan yang permanen. Seorang raja dari jenis ini tidak mempunyai kuasa untuk menghukum mati seseorang, kecuali atas alasan pengecut, seperti yang terjadi pada ekspedisi-ekspedisi militer di zaman kuno, berdasarkan hak kekuasaan yang superior. Ini merupakan satu jenis kerajaan yang berdasarkan komando militer yang dijalankan seumur hidup, sebagian dari jenis ini bersifat turun-temurun dan yang lainnya melalui pemilihan.

Bentuk kerajaan yang lain adalah jenis yang ditemukan di kalangan beberapa masyarakat barbar. Kerajaan dari jenis ini semua memiliki otoritas yang sama dengan tirani; namun, bagaimanapun juga, diatur oleh hukum, dan turun-temurun dari ayah kepada anak. Alasannya ialah bahwa orang-orang barbar ini lebih berwatak budak daripada orang Yunani (seperti orang-orang Asia lebih

---

<sup>61</sup> Aristoteles, *Politik*,... hlm. 136-137.

berwatak budak daripada orang-orang Eropa); dan oleh karena itu, mereka menerima penguasa despotik (penguasa tunggal yang berbuat sekehendak hatinya) tanpa keluhan apapun. Demikianlah kerajaan-kerajaan ini, Karena alasan yang sama para pengawal yang dipakai di dalam kota-kota itu cocok dengan para raja, dan tidak cocok dengan para tiran. Para raja dikawal oleh pasukan-pasukan yang berasal dari rakyatnya dan para tiran dikawal oleh pasukan asing. Dengan memerintah menurut hukum, dan dengan persetujuan para warganya, raja-raja mempunyai para pengawal yang diambil dari rakyatnya dan sang tiran mempunyai pengawal asing untuk melindungi diri juga rakyatnya.

Hal-hal di atas adalah dua tipe monarki; tetapi ada juga jenis ketiga, yang biasanya terdapat di kalangan orang-orang Yunani kuno, yang dinamakan *Aisumneteia*. Secara kasar tipe ini dapat dilukiskan sebagai bentuk tirani berdasarkan pemilihan. Ia berbeda dari kerajaan di kalangan barbar, bukan karena berada di luar hukum, tetapi hanya karena tidak bersifat turun-temurun. Sebagian dari tipe ini memangku jabatan seumur hidup kemudian yang lainnya memangku jabatan untuk periode tertentu atau untuk pelaksanaan suatu tugas terbatas. Misalnya, Pittacus, ia dipilih di Mytilene untuk melaksanakan serangan pada orang-orang buangan yang dipimpin oleh Antimenides dan penyair Alcaeus. Fakta pemilihan Pittacus ditegaskan oleh Alcaeus, di dalam salah satu nyanyian pesta minumannya, dimana ia menyatakan dengan sengit: Pittacus yang terlahir dengan hina di kota yang biadab dan terkutuk, ia dinobatkan oleh mereka untuk menjadi tirannya, dengan hiruk pikuk pujian, di dalam mimbar yang dikerumuni orang.

Bentuk-bentuk pemerintahan ini di dalam hal, dalam hal kekuasaan despotiknya adalah masih tirani, akan tetapi ia merupakan kerajaan, karena lewat pemilihan dan berdasarkan pada persetujuan warga negaranya. Tetapi ada jenis kerajaan yang keempat, yaitu kerajaan-kerajaan di zaman heroik yang berdasarkan pada persetujuan dan turun-temurun dari ayah ke anak menurut hukum.<sup>62</sup> Para pendiri garis kerajaan adalah para dermawan untuk rakyat mereka di dalam seni atau perang: mereka mengumpulkan rakyat di dalam sebuah kota, atau memberinya wilayah; dengan demikian, mereka menjadi raja melalui persetujuan umum, dan telah mendirikan kerajaan yang akan diwariskan kepada para penerusnya. Raja-raja tersebut mempunyai fungsi-fungsi yang tertinggi sebagai komandan di dalam peperangan, dan dalam mempersembahkan kurban-kurban yang tidak memerlukan seorang pendeta dan mereka juga menjadi hakim dalam tindakan-tindakan hukum. Kadang-kadang mereka memutuskan perkara berdasarkan sumpah, dan kadang-kadang tanpa sumpah. Bentuk sumpah, ketika mereka mengucapkannya, ialah dengan mengangkat tongkat sebagai lambang kekuasaannya. Di zaman kuno mereka menikmati suatu otoritas yang permanen, yang menyangkut orang-orang kota, desa, dan hubungan-hubungan luar negeri. Di masa-masa terakhir, mereka melepaskan beberapa hak prerogatifnya karena hak-hak yang lain diambil oleh massa. Di beberapa kota hanya pelaksanaan pengurbanan yang masih tersisa pada raja. Bahkan di tempat yang masih mungkin mengatakan bahwa suatu kerajaan yang nyata masih ada, raja hanya mempunyai kuasa dalam komando militer dan ekspedisi-ekspedisi luar negeri.

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 145-146.

Dengan demikian, ada lima bentuk kerajaan:

- a. Kerajaan zaman heroik, yang didasarkan pada persetujuan umum tetapi terbatas pada sejumlah fungsi, dimana sang raja bertindak sebagai jenderal dan hakim juga sebagai pemimpin ibadat-ibadat religius.
- b. Kerajaan di kalangan orang-orang barbar, dimana raja menjalankan suatu otoritas despotik, melalui hak turun-temurun, meskipun sesuai dengan hukum.
- c. Kerajaan *Aisumneteia*, ini merupakan suatu bentuk tirani yang berdasarkan pemilihan.
- d. Kerajaan Sparta, yang dapat didefinisikan sebagai komando permanen atas angkatan perang yang dijalankan melalui hak turun-temurun.<sup>63</sup>
- e. Kerajaan absolut, dimana seorang pribadi tunggal mempunyai kekuasaan tertinggi atas segala sesuatu dan mempunyai jenis kekuasaan yang sama dengan yang dijalankan oleh sebuah suku atau kota terhadap urusan-urusan publiknya. Ini merupakan sebuah bentuk yang dapat disamakan dengan pemerintahan paternal dalam sebuah rumah tangga, sebagaimana pemerintahan rumah tangga adalah kerajaan bagi sebuah keluarga, sebaliknya bentuk kerajaan ini dapat dianggap sebagai pemerintahan rumah tangga yang dijalankan pada sebuah kota, sebuah suku, atau sekumpulan suku.

Untuk keperluan praktis, hanya ada dua bentuk kerajaan yang perlu kita pertimbangkan: bentuk absolut dan Sparta. Banyak bentuk lainnya yang merupakan pertengahan di antara kedua bentuk ini: Raja-raja mereka berdaulat hingga pada tingkat yang kurang tinggi daripada yang ada di dalam bentuk

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 147.

absolut, tetapi pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang ada pada bentuk Sparta.<sup>64</sup> Dengan demikian, pembahasan kita disusutkan secara praktis pada dua hal. Pertama adalah apakah bijaksana untuk kota-kota itu mempunyai seorang jenderal yang permanen [baik berdasarkan landasan turun-temurun, atau berdasarkan skema giliran tertentu. Kedua adalah apakah bijaksana atau tidak bahwa seorang manusia harus berbahagia dalam segala masalah.

Mengkaji jabatan jendral dan jenis yang baru saja disebutkan itu lebih berupa masalah hukum daripada masalah konstitusi, karena ia dapat berada di bawah sembarang bentuk konstitusi; dan oleh karena itu, kita menunda pertanyaan yang pertama untuk dibahas sekarang ini. Bentuk kerajaan absolut adalah suatu bentuk konstitusi; dan oleh karena itu, kita wajib mempelajarinya secara filosofis, dan mengkaji secara ringkas kesulitan-kesulitan yang dikandungnya. Penelitian kita bermula dari persoalan umum, “Apakah lebih menguntungkan diperintah oleh seorang manusia terbaik daripada oleh hukum yang terbaik?

Orang yang menganggap kerajaan itu menguntungkan berargumen bahwa hukum hanya dapat menetapkan aturan-aturan umum kemudian ia tidak dapat mengeluarkan perintah-perintah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebagaimana yang terjadi, dan oleh karena itu mengikuti aturan-aturan tertulis adalah bodoh dalam segala seni apapun. Di Mesir, tabib diizinkan mengubah aturan-aturan pengobatan setelah empat hari pertama, meskipun seorang tabib yang mengubahnya terlebih dahulu melakukan hal itu dengan

---

<sup>64</sup> Aristoteles, *Politik*,...hlm. 148.

mengambil resiko sendiri. Jelaslah, dengan alasan yang sama, bahwa suatu konstitusi yang didasarkan pada tulisan dan aturan-aturan hukum bukanlah suatu konstitusi yang terbaik. Tetapi, tentu saja, bahwa prinsip umum juga harus ada pada para penguasa. Bentuk yang di dalamnya unsur nafsu tidak ada sama sekali, lebih baik daripada bentuk yang padanya nafsu melekat secara alamiah. Unsur nafsu ini tidak ditemukan di dalam hukum, tetapi selalu hadir di dalam pikiran manusia. Akan tetapi, jawaban yang mungkin dibuat itu bahwa pikiran individu untuk sebagian, dapat mempertimbangkan dan memutuskan lebih baik yang berkenaan dengan isu-isu khusus.

Seorang manusia terbaik harus seorang pemberi hukum, dan harus ada suatu badan hukum, tetapi hukum-hukum ini tidak boleh berdaulat dimana mereka gagal untuk mengenai sasaran, meskipun mereka juga demikian di dalam semua kasus lainnya. Tetapi di dalam kasus-kasus yang tidak dapat diputuskan sama sekali, atau tidak dapat diputuskan dengan pantas oleh hukum, haruskah pemerintahan dijalankan oleh orang yang terbaik atau oleh segenap masyarakat?

Dalam praktek aktual di zaman kita, orang banyak berkumpul bersama untuk menilai, mempertimbangkan, dan membuat keputusan-keputusan. Putusan-putusan ini semuanya berhubungan dengan masalah-masalah khusus. Setiap individu, sejauh menyangkut kontribusinya sendiri itu bisa inferior. Kota terdiri dari banyak individu, tetapi sebagaimana sebuah pesta dimana kontribusi yang diberikan oleh orang banyak lebih baik daripada yang diberikan seseorang juga karena sebab yang sama, suatu kumpulan orang dapat mencapai keputusan yang lebih baik di dalam banyak hal, daripada seorang individu.

Lagipula, suatu badan yang terdiri dari banyak orang kemungkinan besar kurang korup. Sama halnya bahwa suatu volume air yang lebih besar itu tidak begitu mudah terkena polusi, orang banyak tidak begitu mudah terkena masalah korupsi daripada segelintir orang. Penilaian orang yang tunggal pasti rusak ketika ia dilanda kemarahan atau emosi lain yang serupa, tetapi bukanlah tugas yang mudah untuk membuat setiap orang marah dan keliru secara serempak. Bayangkanlah bahwa semua orang banyak adalah orang yang bebas, tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan hukum, dan bertindak di luar hukum hanya dalam soal-soal dimana hukum wajib diabaikan. Hal ini mungkin tidak mudah bila banyak orang yang terlibat, tetapi jika mayoritas adalah orang yang baik maupun warga Negara yang baik itu yang mana akan menjadi lebih mungkin untuk bebas dari korupsi, satu orang, atau orang dengan jumlah yang lebih besar, yang semuanya adalah orang yang baik? Bukankah keseimbangan itu jelas-jelas menguntungkan jumlah yang lebih besar?<sup>65</sup>

Mungkinkah orang banyak tidak tunduk pada golongan, dan salah satu dari mereka akan bebas? Barangkali suatu jawaban pada keberatan ini ialah bahwa mereka akan mempunyai karakter mental yang baik sebagaimana dimiliki satu orang. Jika kita menyebut pemerintahan sejumlah orang yang merupakan orang yang baik dengan nama aristokrasi, dan pemerintahan seorang pribadi tunggal dengan nama kerajaan, kita dapat mengatakan bahwa aristokrasi lebih baik untuk kota-kota daripada kerajaan [entah pemerintahan dijalankan dengan

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 149-150.

paksaan atau tanpa paksaan], asalkan bahwa sejumlah orang yang mempunyai karakter yang sama dapat ditemukan.

Barangkali penyebab mengapa dahulu terdapat banyak berdiri kerajaan menjadi hal yang sudah biasa ialah karena jarang ditemukan sejumlah orang yang mempunyai kebaikan yang menonjol, apalagi karena kota-kota yang mereka huni itu kecil. Penyebab selanjutnya mengapa Raja-raja dinobatkan ialah bahwa mereka adalah para dermawan, sebagaimana fungsi dari orang yang baik. Belakangan ketika terdapat sejumlah orang yang mempunyai kebaikan yang sama, mereka tidak lagi menahan tetapi mencoba mempunyai sesuatu yang dapat dimiliki bersama dan karena itu mereka menetapkan sebuah konstitusi. Bahkan kemudian mereka berwatak buruk dan memperkaya diri dari harta benda publik kemudian dari sini asal-usul munculnya oligarki, karena mereka mulai memandang kekayaan sebagai kehormatan. Dari oligarki, pertama muncullah perubahan menjadi tirani dan, dari tirani kemudian berubah menjadi demokrasi, alasannya ialah bahwa ketamakan pada keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh jabatan, mereka batasi pada lingkaran yang semakin sempit, dan dengan kebijakan ini mereka memperkuat massa sampai mereka bangkit memberontak dan menetapkan demokrasi, karena kota-kota telah menjadi lebih besar, barangkali kita dapat mengatakan bahwa sekarang ini sulit bagi segala bentuk konstitusi untuk hidup terpisah dari demokrasi.

Jika kerajaan diterima sebagai bentuk pemerintahan yang terbaik bagi kota-kota, bagaimana posisi anak-anak raja? Apakah kita mengatakan bahwa keturunannya juga harus menjadi raja? Jika ternyata beberapa dari mereka telah

dinobatkan, hasilnya akan merugikan. Dapat dijelaskan bahwa seorang raja, meskipun ia mempunyai kuasa untuk melakukannya itu tidak akan menyerahkan mahkota kepada anaknya [jika mereka tidak cocok], tetapi ini sulit dilakukan, dan memerlukan derajat kebaikan yang lebih besar daripada yang cocok dengan sifat dasar manusia.

Pertanyaan lain yang memunculkan kesulitan ialah mengenai pasukan yang harus dimiliki oleh seorang raja, haruskah ia mempunyai pengawal sendiri yang akan memungkinkannya memaksa orang yang tidak mau patuh? Jika tidak, bagaimana mungkin ia berhasil memerintah? Meskipun ia adalah seorang yang berkuasa untuk memerintah menurut hukum juga tidak pernah bertindak menurut kehendaknya sendiri di luar hukum, tentu saja ia harus mempunyai pasukan untuk menjaga hukum. Dalam masalah seorang raja dari jenis ini [yang memerintah menurut hukum] itu barangkali mudah menjawab pertanyaan seperti ini. Ia harus mempunyai pasukan tertentu yang harus cukup membuat kekuasaannya lebih besar daripada yang dipimpin oleh setiap individu atau kelompok individu tetapi kurang daripada kekuasaan rakyat banyak. Beginilah hakikat pengawal yang ditetapkan di zaman kuno, ketika seseorang memimpin suatu kota dengan nama *aisumnets* atau Tiran. Ini juga yang merupakan ukuran pasukan yang dianjurkan seseorang di Syracuse, kepada rakyat banyak, untuk diberikan kepada Dionysius ketika ia meminta pengawal.<sup>66</sup>

## **E. Kekuasaan**

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 151-152.

Plato mendudukan pengetahuan di tempat yang paling mulia, karena ia beranggapan bahwa hanya pengetahuanlah yang sanggup membimbing dan menuntun manusia untuk datang pada pengenalan yang benar akan segala sesuatu yang ada dengan dan dalam keberadaannya masing-masing. Oleh sebab itu, pengetahuan layak ditempatkan di tempat yang paling utama dan mulia, maka wajarlah apabila pengetahuan itu menjadi sumber kekuasaan. Aristoteles tidak sependapat dengan Plato mengenai sumber kekuasaan, namun itu tidak berarti Aristoteles lalu kembali ke pandangan tradisional yang menempatkan agama atau dewa sebagai sumber kekuasaan, kendati pandangan tradisional itu masih begitu erat digenggam oleh banyak orang pada masa itu. Ia pun tidak sependapat dengan orang-orang tertentu yang menempatkan kekayaan di tempat yang mulia, meski dalam kenyataannya kekayaan sanggup mempengaruhi dan mengatur para penguasa, namun bagi Aristoteles hal itu tidak dapat menjadi alasan untuk menempatkannya sebagai sumber kekuasaan kemudian dia juga tidak setuju untuk menempatkan kedudukan, pangkat, dan jabatan sebagai sumber kekuasaan.<sup>67</sup>

Menurut Aristoteles, sumber kekuasaan ialah hukum kemudian ia menegaskan bahwa hanya apabila hukum yang menjadi sumber kekuasaan, barulah pemerintahan para penguasa akan terarah bagi kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum. Dan hanya apabila hukum yang menjadi sumber kekuasaan bagi para penguasa Negara barulah dapat dijamin bertumbuhnya moralitas yang terpuji dan keadaban yang tinggi yang sanggup mencegah para penguasa itu dari kesewenang-wenangan.

---

<sup>67</sup> J.H Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 53-54.

Bilamana hukum menjadi sumber kekuasaan, itu berarti hukum memiliki kewibawaan dan kedaulatan tertinggi. Hanya hukumlah yang harus memiliki kedaulatan yang tertinggi dan bukan manusia, sebab bagaimanapun arifnya para penguasa itu, tidak mungkin mereka dapat menggantikan hukum. Apabila ajaran Aristoteles disimak dengan cermat maka akan terlihat bahwa sesungguhnya ia menempatkan hukum lebih tinggi kedudukannya dari *filosof dan Raja* yang merupakan gagasan Plato. Aristoteles menyamakan hukum dengan akal atau kecerdasan bahkan dewa, sehingga barangsiapa yang memberi tempat bagi hukum untuk memerintah, berarti ia telah memberi tempat bagi dewa dan akal serta kecerdasan untuk memerintah. Sebaliknya, barangsiapa yang memberi tempat bagi manusia untuk memerintah, berarti ia memberi tempat bagi binatang buas, karena, bagaimanapun bijaksananya manusia, ia tetap memiliki keinginan dan nafsu yang bagaikan binatang buas itu sanggup mengubah manusia yang paling arif menjadi makhluk yang paling rendah. Oleh sebab itu hanya hukumlah yang patut memiliki kedaulatan tertinggi dan hanya hukumlah yang layak menjadi sumber kekuasaan, karena hukum adalah akal atau kecerdasan yang tidak dapat dipengaruhi oleh keinginan dan nafsu.

Pemerintahan yang baik terletak pada pengakuan para penguasa bahwa hukum memiliki kedaulatan tertinggi. Pengakuan tersebut harus tampak dalam penyelenggaraan kekuasaan yang didasarkan pada hukum. Oleh sebab itu bagi Aristoteles, kedaulatan hukum merupakan bukti bahwa pemerintahan dalam negara yang mengakui kedaulatan hukum itu adalah baik. Dengan demikian, hukum tidak boleh dilihat hanya sebagai sarana semata-mata, melainkan juga

sebagai akal atau kecerdasan yang tidak dapat dipengaruhi oleh keinginan dan nafsu atau dengan kata lain, hukum itu hidup dan berkuasa.<sup>68</sup> Hukum yang hidup dan berkuasa itulah yang harus diletakkan di tempat teratas untuk menjadi sumber kekuasaan yang menjamin bertumbuhnya moralitas yang terpuji dan keadaban yang tinggi yang akan mencegah para penguasa dari kesewenang-wenangan, serta mengarahkan para penguasa itu untuk memerintah demi kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum.

Supremasi hukum yang dianjurkan oleh Aristoteles bukanlah supremasi hukum yang menyisihkan kedudukan dan kekuasaan para penguasa, bahkan sebaliknya supremasi hukum itu justru meneguhkan dan mengokohkan kedudukan juga kekuasaan para penguasa. Sebab hukumlah yang menumbuhkan moralitas yang terpuji dan keadaban yang tinggi dan hanya apabila para penguasa Negara memiliki moralitas yang terpuji dan keadaban yang tinggi itu barulah mereka memiliki kewibawaan yang sesungguhnya untuk menyelenggarakan kekuasaan mereka.

Aristoteles juga mengatakan bahwa pada dasarnya, manusia sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hukum, karena hanya dengan dan di dalam hukum itulah manusia dapat mencapai puncak perkembangan yang tertinggi dari kemanusiaannya, tetapi apabila manusia terpisah dari hukum, maka ia akan berubah menjadi yang terburuk di antara segala makhluk. Oleh sebab itu, Aristoteles menegaskan bahwa supremasi hukum merupakan syarat mutlak bagi

---

<sup>68</sup> JH Rapar, *Filsafat Politik: Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli*, [Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001], hlm. 192-193.

kehidupan yang bermoral dan beradab, baik untuk para penguasa, maupun untuk para warga negara.<sup>69</sup>

## **F. Penguasa**

Bagi Aristoteles, masalah yang penting untuk disoroti, yang berhubungan dengan pemegang kekuasaan itu ialah: apa yang dikemukakan oleh Plato dalam buku *Republik*, yaitu bahwa yang layak menjadi pemegang kekuasaan ialah orang pilihan yang dianggap terbaik dan yang paling unggul di antara semua orang pilihan, yakni orang yang memiliki pengetahuan dan kebajikan yang sempurna. Aristoteles mempertanyakan ulang, apakah benar bahwa orang pilihan yang terbaik dan terunggul itulah yang betul-betul layak menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara? Memang apabila dapat ditemukan orang yang demikian itu, maka tanpa ragu-ragu, kekuasaan tertinggi dalam negara harus diserahkan kepadanya. Namun, jika dapat ditemukan orang yang sempurna seperti itu, bukankah ia dewa di antara manusia? Aristoteles mendukung pendapat Plato yang mengatakan bahwa negara yang dipimpin oleh orang pilihan yang terbaik dan terunggul itu adalah negara ideal, tetapi di bumi ini, mungkinkah ditemukan negara ideal dengan pemegang kekuasaan yang ideal seperti itu? Hal yang demikian itu hanya dapat dijumpai dalam teori. Itulah pula sebabnya secara teoritis Aristoteles mengatakan bahwa monarki adalah bentuk pemerintahan yang paling ideal bilamana dapat ditemukan seorang penguasa atau seorang raja yang memiliki pengetahuan dan kebajikan yang sempurna, yang benar-benar arif dan bijaksana bagaikan filosof-raja yang didamba-dambakan Plato.

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 193-194.

Namun karena hal itu tidak mungkin dapat dijumpai di muka bumi ini, maka yang penting ialah bukan mencari orang yang terbaik melainkan menyusun hukum yang terbaik, yang tidak hanya harus menjadi sumber kekuasaan tetapi juga sebagai pedoman bagi pemegang kekuasaan itu. Hukum yang merupakan sumber kekuasaan dan pedoman pemerintahan itu harus memiliki kedaulatan dan kewibawaan tertinggi dan karena demikian pentingnya peranan hukum, maka hukum yang menjadi sumber kekuasaan dan pedoman pemerintahan itu haruslah hukum yang benar-benar terbaik. Menurut Aristoteles, bentuk pemerintahan negara yang terbaik bagi hukum yang terbaik itu adalah politeia, bentuk politeia yang baik ialah yang berada di antara oligarki dan demokrasi, oleh karena itu, menurut Aristoteles, janganlah orang-orang kaya seperti dalam bentuk oligarki yang menjadi pemegang kekuasaan, tetapi juga jangan orang-orang miskin seperti dalam bentuk demokrasi yang menjadi penguasa, tetapi mereka yang berada di antara dua golongan itu, yakni golongan menengah, yang biasa membawa senjata, mereka itulah yang paling tepat menjadi pemegang kekuasaan. Golongan menengah-lah yang dapat menjaga keseimbangan antara golongan kaya dan golongan miskin. Aristoteles menegaskan bahwa apabila dalam suatu negara terdapat kelas menengah yang sangat besar, dan mereka juga yang menjadi pemegang kekuasaan dalam negara itu dan takluk pada hukum, maka dapat diharapkan negara itu akan menjadi negara yang sangat kuat dan sanggup bertahan dalam waktu yang lama.

Selain itu, Aristoteles juga yakin akan kebaikan dari kekuasaan yang berada di tangan banyak orang. Bagi Aristoteles, jumlah orang yang begitu besar

akan memperkecil kemungkinan masuknya hal-hal buruk yang dapat membahayakan negara. Sebab, bilamana pemegang kekuasaan itu orang banyak, maka sudah pasti kebijaksanaan kolektif dari sekian banyak orang akan jauh lebih baik daripada kebijaksanaan satu orang atau beberapa orang, kendatipun mereka adalah orang-orang yang pandai.<sup>70</sup>

### **G. Hukum Kebiasaan dan Hukum Tertulis**

Aristoteles adalah filosof pertama yang membedakan antara hukum kebiasaan [*customary laws*] dan hukum tertulis [*written laws*]. Hukum kebiasaan adalah landasan dari segala pengetahuan dan pengalaman manusia sepanjang masa, oleh sebab itu hukum kebiasaan bersifat abadi, berlaku dengan sendirinya dan pada dasarnya tidak berubah-ubah. Adapun hukum tertulis itu seluruhnya dibuat, disusun, dan ditetapkan oleh manusia. Sebagai contoh, jika hukum kebiasaan mengatakan bahwa setiap warga Negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kehidupan bernegara, maka hukum tertulis yang disusun dalam bentuk undang-undang itu mengatur bagaimana setiap warga negara harus berperan serta dalam kehidupan bernegara, baik lewat kepemimpinan negara ataupun partai politik dan lain sebagainya.

Menurut Aristoteles, hukum kebiasaan lahir dari pandangan dan pendapat umum dalam jangka waktu yang amat panjang. Pandangan dan pendapat umum itu dibentuk oleh kebijaksanaan kolektif seluruh rakyat. Kebijaksanaan kolektif seluruh rakyat yang membentuk pandangan dan pendapat umum itu sesudah diuji

---

<sup>70</sup> J.H Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 55-57.

oleh waktu akan menghasilkan untaian hukum yang akan melampaui hasil yang dicapai oleh para pembuat hukum yang paling arif sekalipun. Oleh karena itu, Aristoteles menempatkan hukum kebiasaan itu lebih tinggi daripada hukum tertulis. Ia mengatakan bahwa hukum kebiasaan itu sesungguhnya jauh lebih berbobot dari hukum tertulis karena hukum kebiasaan itu berhubungan dengan begitu banyak hal yang penting dan hakiki. Aristoteles juga berpendapat bahwa seorang penguasa dapat memerintah dengan baik dan bijak, bahkan mungkin lebih baik dan bijaksana daripada hukum tertulis, namun tidak mungkin seorang pun dapat melebihi hukum kebiasaan.<sup>71</sup>

#### **H. Varietas Tipe-tipe Utama Konstitusi Khususnya Demokrasi, Oligarki, dan Pemerintahan Konstitusional atau Polity**

Penyebab mengapa ada banyak konstitusi yang berbeda ditemukan di dalam fakta bahwa setiap kota mempunyai banyak bagian yang berbeda-beda:

1. Setiap kota terdiri dari sejumlah rumah tangga.
2. Di dalam Sejumlah rumah tangga itu terdapat ada yang sebagian kaya, Sebagian yang miskin juga ada sebagian yang berada di level pertengahan, yaitu: antara kaya dan miskin, dan orang kaya yang memiliki perlengkapan prajurit bersenjata berat dan orang miskin yang tidak memilikinya.
3. Orang awam yang sebagian sibuk di dalam pertanian, perdagangan, dan pekerjaan-pekerjaan kasar.

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 194-195.

4. Ada juga perbedaan-perbedaan di antara orang-orang terkemuka, perbedaan-perbedaan ini berdasarkan kekayaan dan jumlah harta benda mereka, perbedaan ini tampak, misalnya: di dalam soal pemeliharaan kuda. Pemeliharaan kuda hanya dapat dilakukan oleh orang yang sangat kaya, inilah sebabnya mengapa kota-kota yang kekuatannya terletak pada pasukan berkuda pada zaman bahari adalah tempat tinggal para oligarkus. Para oligarkus ini menggunakan pasukan berkudanya di dalam peperangan dengan kota-kota tetangganya, kita dapat mengutip contoh Eretria dan Khalkis (yang ada di Pulau Euboea) dan Magnesia yang ada di Maeander dan banyak kota-kota lain di Asia kecil. Di samping perbedaan-perbedaan kekayaan, ada juga perbedaan kelahiran dan perbedaan jasa juga terdapat perbedaan-perbedaan yang didasarkan pada faktor-faktor lain dalam golongan yang sama.

Kadang-kadang semua bagian ini berpartisipasi di dalam pengendalian konstitusi, kadang-kadang hanya segelintir dari mereka yang ikut berperan juga kadang-kadang sejumlah orang dari mereka ikut ambil bagian. Dengan demikian, jelaslah bahwa pasti ada sejumlah konstitusi yang berbeda-beda jenisnya antara satu dengan yang lain. Hal ini karena bagian-bagian berbeda jenisnya antara satu dengan yang lain. Sebuah konstitusi adalah suatu tata susunan yang berkaitan dengan jabatan-jabatan yang ada di dalam kota. Dengan adanya tata susunan ini, badan warga negara menyalurkan jabatan itu berdasarkan kekuasaan orang-orang yang berpartisipasi di dalamnya, atau berdasarkan kesamaan yang umum, seperti: kesamaan orang miskin, orang kaya, atau kesamaan yang ada di kalangan baik

orang miskin maupun orang kaya. Oleh karena itu, pasti ada banyak bentuk tata susunan penyaluran jabatan berdasarkan superioritas dan perbedaan bagian-bagian kota yang sebanyak varietas konstitusi.

Banyak pendapat yang mengatakan bahwa konstitusi itu jumlahnya hanya ada dua. Sebagaimana halnya angin, dalam cara bicara sehari-harinya itu dilukiskan hanya mempunyai arah utara atau selatan, dan semua angin lainnya dianggap merupakan penyimpangan dari kedua angin ini, demikianlah konstitusi-konstitusi ini juga dilukiskan bersifat demokratis atau oligarkis. Berdasarkan hal ini, aristokrasi diklasifikasi sebagai suatu jenis oligarki yang termasuk bagian oligarkis, demikian pula apa yang disebut pemerintahan konstitusional (*polity*) diklasifikasi dibawah judul demokrasi, sebagaimana angin dari barat diklasifikasi di bawah judul utara, dan angin dari timur diklasifikasikan di bawah judul selatan. Sebagian orang menganggap situasi itu banyak persamaannya dengan bentuk-bentuk yang terdapat di dalam musik. Di dalam pandangan mereka ada dua gaya musik, Dorian dan Phrygian itu juga dianggap sebagai dasar dan susunan yang lain disebut dengan nama yang satu atau nama yang lain dari nama ini. Tetapi meskipun inilah pandangan yang lazim tentang konstitusi di zaman kita, kita akan melakukan yang lebih baik, dan kita akan mendekati kebenaran, jika kita mengklasifikasinya berdasarkan suatu basis yang berbeda, seperti yang sudah disarankan. Berdasarkan basis itu kita akan mempunyai satu atau dua konstitusi yang dibentuk dengan tepat. Semua yang lainnya akan menjadi penyimpangan dari konstitusi terbaik (sebagaimana di dalam musik, kita mungkin mempunyai penyimpangan-penyimpangan dari bentuk yang diperlembut dengan tepat); dan

penyimpangan-penyimpangan ini akan bersifat akan bersifat oligarkis bila mereka terlalu keras dan dominan, dan akan bersifat demokratis ketika mereka lunak dan bersantai.<sup>72</sup>

Jangan diasumsikan, seperti yang biasa dilakukan orang pada masa kini, bahwa demokrasi dapat didefinisikan tanpa persyaratan apapun, sebagai suatu bentuk konstitusi yang di dalamnya itu jumlah orang yang lebih besar yang berdaulat. Di dalam oligarki pun, dan sebenarnya di dalam semua konstitusi itu mayoritas berdaulat. Demikian juga oligarki tidak bisa didefinisikan secara sederhana sebagai suatu bentuk pemerintahan dimana segelintir orang mempunyai kedaulatan atas konstitusi. Bayangkan bahwa total populasi 1300 orang, dan bahwa 1000 dari 1300 adalah orang kaya, dan 1000 orang ini tidak memberikan jabatan kepada 300 orang miskin sisanya, meskipun mereka adalah orang yang lahir sebagai orang bebas. Tidak seorangpun akan mengatakan bahwa rakyat ini diatur dengan cara demokratis atau bayangkan bahwa ada segelintir saja orang miskin tetapi mereka lebih kuat daripada orang kaya yang membentuk mayoritas, tidak ada seorangpun akan menyebut konstitusi tersebut oligarki, jika tidak ada jabatan-jabatan kehormatan yang diberikan kepada kelompok yang kaya. Oleh karena itu, lebih baik mengatakan bahwa demokrasi eksis dimanapun orang yang dilahirkan itu merdeka dan berdaulat, dan bahwa oligarki eksis dimanapun orang yang kaya berdaulat.

Namun kriteria kemiskinan dan kekayaan ini pun tidak cukup untuk membedakan konstitusi yang sedang dibicarakan. Kita harus mengingat bahwa

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 167-169.

kota yang demokratis dan oligarkis sama-sama memuat sejumlah bagian-bagian. Oleh karena itu, kita tidak dapat menerapkan istilah demokrasi kepada suatu konstitusi yang dibawahnya itu orang-orang yang lahir merdeka memerintah suatu mayoritas yang tidak lahir merdeka. (Suatu sistem jenis ini pernah ada di Apolonia, Teluk Ionia, dan Thera. Di kota-kota ini, kehormatan maupun jabatan-jabatan diberikan pada orang-orang yang mempunyai kelahiran yang terbaik, dalam arti keturunan dari para penghuni tetap yang asli, walaupun mereka hanya segelintir dari seluruh populasi).<sup>73</sup> Kita juga tidak dapat menerapkan istilah demokrasi kepada suatu konstitusi yang dibawahnya itu orang kaya berdaulat hanya karena mereka lebih banyak jumlahnya daripada orang miskin. Suatu contoh dari konstitusi tersebut dulu ada di Colophon, dimana sebelum berperang dengan Lidya itu mayoritas warga negara adalah pemilik harta benda yang banyak. Terdapat suatu demokrasi yang apabila orang-orang yang lahir merdeka dan orang miskin mengendalikan pemerintahan maka pada saat yang sama adalah suatu mayoritas, dan demikian pula ada suatu oligarki, ketika orang kaya dan orang yang mempunyai kelahiran yang lebih baik mengendalikan pemerintahan maka pada saat yang sama adalah suatu minoritas.

Fakta bahwa ada sejumlah konstitusi, dan penyebab fakta itu sudah ditetapkan. Sekarang kita harus menjelaskan mengapa adanya konstitusi lebih dari dua yang baru saja disebutkan, yaitu: demokrasi dan oligarki menunjukkan apakah konstitusi itu, dan menyarankan alasan-alasan untuk keberadaannya. Untuk melakukan penjelasan, kita bisa mengawali dari prinsip yang dinyatakan

---

<sup>73</sup> J.H Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*,... hlm. 170-171.

sebelumnya, dan yang sekarang kita sepakati, bahwa setiap kota terdiri dari banyak bagian yang bukan hanya satu.

Jika kita bermaksud untuk membuat klasifikasi jenis-jenis binatang yang berbeda, kita harus mulai dengan menjelaskan satu-persatu apa yang niscaya bagi setiap binatang. Hal ini akan mencakup, misalnya, sebagian dari organ pancaindra, organ untuk mencerna makanan, seperti mulut dan perut, dan selain itu, organ-organ daya penggerak yang dipergunakan oleh binatang-binatang yang berbeda.<sup>74</sup> Dengan mengasumsikan bahwa terdapat begitu banyak organ-organ ini dan bahwa mereka mempunyai bentuk-bentuk yang berbeda, maksud saya bahwa ada bentuk-bentuk mulut, perut, alat-alat pancaindra, dan bentuk organ-organ penggerak, jumlah kombinasi yang mungkin dari varietas-varietas ini mau tidak mau akan menghasilkan beberapa jenis hewan yang berbeda (karena jenis binatang yang sama tidak dapat memperlihatkan beberapa varietal mulut, atau telinga). Dengan demikian, bila semua kombinasi yang mungkin telah diperhitungkan, mereka akan menghasilkan jenis-jenis hewan yang berbeda dan terdapat banyak kombinasi organ-organ yang diperlukan sebanyak jenis-jenis hewannya.

Begitu pula dengan konstitusi yang telah kita sebutkan. Kota-kota juga, seperti telah kita perhatikan berulang-ulang, tidak hanya terdiri dari satu bagian, melainkan banyak bagian. Salah satu dari bagian-bagian ini terdiri dari:

- a. Orang-orang yang mengurus produksi makanan atau kelas petani

---

<sup>74</sup> Aristoteles, *Politik*,... hlm. 171-172.

- b. Kelas montir, yang terdiri dari orang-orang yang sibuk di dalam berbagai jenis seni dan kerajinan yang tanpanya sebuah kota tidak mungkin dihuni, sebagian dari mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, mendapatkan kehidupan yang mewah, dan menjalani kehidupan yang baik.
- c. Kelas pedagang, yang mencakup semua orang yang sibuk dalam aktivitas pembelian dan penjualan, entah sebagai saudagar atau pengecer.
- d. Kelas buruh yang diupah.
- e. Pasukan pertahanan.

Karena alasan ini, penjelasan mengenai masalah ini yang ada di dalam *Republik* itu tidak memadai, meskipun kreatif. Sokrates mulai dengan menyatakan bahwa ada empat unsur yang sangat dibutuhkan untuk konstitusi sebuah kota. Ia mengatakan bahwa unsur-unsur ini adalah

- 1. tukang tenun.
- 2. Petani.
- 3. Pembuat sepatu.<sup>75</sup>
- 4. Para pembangun.

Kemudian ia melanjutkan, dengan alasan bahwa keempat golongan di atas tidak swasembada, ia menambahkan golongan-golongan lain:

- a. Pandai besi.
- b. Penggembala untuk memelihara ternak yang diperlukan.

---

<sup>75</sup>*Ibid*, hlm. 172-173.

c. Para pedagang.

d. Para pengecer.

Ini adalah bagian-bagian yang membentuk seluruh komplemen dari “kota yang pertama” yang ia ringkaskan, seakan-akan setiap kota ada hanya untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan dan bukannya untuk mencapai kebaikan, seakan-akan kota memerlukan pembuat sepatu sebanyak ia memerlukan petani.

Sokrates tidak memberi bagian kepada pasukan pertahanan sampai adanya pertumbuhan wilayah di kota dan kontaknya dengan para tetangga, membuat mereka terlibat dalam peperangan. Lagipula, bahkan di kalangan empat bagian yang semula, atau berapapun jumlah unsur-unsur yang membentuk asosiasi itu, dibutuhkan adanya seseorang yang menyalurkan keadilan, dan untuk menentukan apa yang adil. Jika pikiran dianggap sebagai bagian yang lebih esensial dari suatu makhluk hidup daripada tubuh maka bagian-bagian dari suatu tatanan yang sama juga harus dianggap sebagai bagian-bagian kota yang lebih esensial daripada bagian-bagian yang melayani kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Dengan ini yang kita maksudkan ialah bagian militer, bagian yang mengurus pengaturan legal keadilan, dan bagian yang terlibat di dalam pertimbangan mendalam, yang merupakan suatu fungsi yang membutuhkan bakat pemahaman politis. Apakah orang-orang yang menjalankan fungsi ini termasuk ke dalam suatu kelompok tersendiri atau kelompok yang sama itu tidak mempengaruhi argumen itu. Hal ini sering menimpa orang yang sama yang bertugas di dalam pasukan dan menggarap ladang. Oleh karena itu, jelas bahwa jika orang-orang ini dianggap merupakan bagian-bagian kota di samping yang disebutkan pertama kali, maka

unsur-unsur yang termasuk tentara itu bagaimanapun juga adalah bagian kota yang sangat penting.

Fakta bahwa ada sejumlah konstitusi, dan sebab-sebabnya sudah ditetapkan. Sekarang kita dapat melanjutkan dengan mengatakan bahwa ada juga sejumlah varietas baik demokrasi maupun oligarki. Penyebab hal ini ialah karena baik bagi orang kebanyakan maupun orang-orang terkemuka bervariasi di dalam jenisnya. Sejauh menyangkut orang kebanyakan, jenis yang satu sibuk di dalam pertanian; yang kedua sibuk di dalam seni dan pertukangan; yang ketiga adalah pemasaran (sibuk di dalam pembelian dan penjualan); yang keempat adalah jenis maritim. (Kita dapat mencatat bahwa ada banyak tempat dimana salah satu dari subdivisi-subdivisi ini membentuk suatu badan yang sangat luas; seperti yang dilakukan para penangkap ikan di Tarentum dan Byzantium, kru angkatan laut di Athena, pelaut pedagang di Aegina dan Chios, dan para awak kapal tambang di Tenedos).<sup>76</sup>

1. Varietas demokrasi yang pertama ialah varietas yang disebut-sebut paling dekat mengikuti prinsip persamaan. Di dalam varietas ini hukum memaklumkan kesamaan yang berarti bahwa kaum miskin tidak dianggap lebih daripada kaum kaya juga tidak mempunyai kekuasaan tertinggi dan keduanya berada di suatu level. Karena jika kita menganggap, seperti yang dilakukan beberapa pemikir, bahwa kebebasan adalah yang terutama ditemukan di dalam demokrasi dan hal yang sama juga berlaku untuk persamaan hak, kondisi ini terwujud sepenuhnya bila semua orang berpartisipasi sejauh mungkin, dengan syarat-syarat yang sama

---

<sup>76</sup> Aristoteles, *Politik*,...hlm. 174-175

di dalam konstitusi. Suatu konstitusi dari golongan ini pasti adalah satu demokrasi; karena rakyat adalah mayoritas, dan keputusan mayoritas itu berdaulat.

2. Varietas demokrasi yang kedua: varietas dimana jabatan-jabatan diberikan berdasarkan suatu persyaratan harta benda, tetapi persyaratan itu rendah; orang yang memenuhi persyaratan harus diizinkan mendapat bagian dalam jabatan, dan orang yang tidak memenuhinya akan tersisih.
3. Varietas demokrasi yang ketiga: varietas dimana setiap warga negara yang berasal dari keturunan yang tidak tercela dapat mengambil bagian dalam jabatan, tetapi hukum adalah kedaulatan tertinggi.
4. Varietas demokrasi yang keempat: varietas dimana setiap orang, asalkan ia seorang warga negara, dapat mengambil bagian dalam jabatan, tetapi hukum masih merupakan kedaulatan terakhir.
5. Varietas demokrasi yang kelima: varietas yang sama di dalam hal-hal lain, tetapi kedaulatan tertinggi yang terakhir adalah rakyat, bukan hukum.

Di kota-kota yang mempunyai demokrasi menurut hukum itu tidak ada para penghasut; orang yang terbaik dan para warga negara itulah yang mengatur semua urusan. Para penghasut muncul di kota-kota dimana hukum tidak berdaulat kemudian rakyat menjadi suatu monarki, yaitu: suatu monarkus gabungan tunggal yang dibentuk dan terdiri dari anggota yang banyak, dengan orang banyak memegang kekuasaan tertinggi, bukan secara individual, tetapi secara kolektif.<sup>77</sup> Para pemimpin bermasalah itu menyerahkan semua isu pada keputusan rakyat,

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 176.

yang bertanggung jawab atas penggantian kedaulatan hukum dengan kedaulatan dekrit. Sumber posisi mereka yang hebat ialah bahwa rakyat berdaulat di dalam semua masalah sementara mereka sendiri, karena orang banyak mengikuti petunjuk mereka juga berdaulat terhadap keputusan rakyat. Di samping itu, para penentang orang-orang yang menempati posisi-posisi resmi berargumen “Rakyat harus memutuskan”; dengan cepat rakyat menerima ajakan itu; dan dengan demikian semua jabatan kehilangan kewenangan.

Orang yang mengkritik jenis demokrasi ini mengatakan bahwa bukanlah suatu konstitusi yang tampak benar jika hukum tidak berdaulat dan disana tidak ada konstitusi. Hukum harus berdaulat untuk setiap isu kemudian para pejabat dan konstitusi harus memutuskan dengan terperinci. Dengan demikian, jelaslah bahwa sekalipun demokrasi adalah suatu bentuk konstitusi, sistem khusus yang dibawahnya segala sesuatu diatur melalui dekrit-dekrit itu tidak sungguh-sungguh suatu demokrasi, di dalam arti yang tepat dari kata itu, karena dalam wataknya itu dekrit-dekrit tidak pernah bersifat umum.

Dengan demikian, bentuk-bentuk demokrasi yang berbeda itu dapat didefinisikan dengan cara sebagai berikut:

- a. Di antara oligarki itu satu varietasnya ialah yang didalamnya pengelolaan jabatan tergantung pada persyaratan harta benda itu cukup tinggi sehingga menyisihkan kaum miskin, meskipun mereka membentuk mayoritas, tetapi disini dimungkinkan bagi siapapun yang mampu memenuhi jumlah harta benda yang ditetapkan untuk mempunyai bagian di dalam konstitusi.

- b. Varietas kedua ialah yang di dalamnya persyaratan menggunakan harta benda itu tinggi, dan yang di dalamnya mereka sendiri memilih para pengganti untuk setiap lowongan, dimana mereka memilih para pengganti dari seluruh badan rakyat yang memenuhi persyaratan, konstitusi dapat dianggap cenderung berada di dalam arah aristokrasi.
- c. Varietas ketiga ialah bila anak-anak menggantikan ayah mereka.

Ini adalah beberapa varietas oligarki dan demokrasi. Akan tetapi, harus diperhatikan bahwa di dalam kehidupan aktual sering terjadi bahwa konstitusi-konstitusi yang tidak demokratis secara hukum dibuat bekerja secara demokratis melalui kebiasaan-kebiasaan dan pelatihan untuk rakyat. Sebaliknya, ada kasus-kasus lain dimana konstitusi hukum cenderung ke arah demokrasi, tetapi dibuat melalui pelatihan dan kebiasaan untuk bekerja dengan cara yang cenderung lebih ke arah oligarki, khususnya ini terjadi setelah suatu revolusi. Para warga negara tidak mengubah watak mereka dengan segera, dan di dalam tahap-tahap pertama partai yang menang mutlak untuk membiarkan hal-hal tersebut tanpa mencoba untuk mengambil keuntungan yang besar dari lawan-lawannya. Hasilnya ialah bahwa hukum-hukum lama tetap berkuasa, meskipun orang-orang yang mengubah konstitusi itu benar-benar sedang berkuasa.<sup>78</sup>

Dari penjelasan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat banyak sekali jenis demokrasi dan oligarki, karena jelas bahwa baik semua maupun

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 177-179.

sebagian kelas yang telah disebutkan harus memiliki andil dalam pemerintahan.

Di bawah ini ada beberapa jenis demokrasi, yaitu:

1. Demokrasi pertama: Ketika kelas petani dan mereka yang memiliki kekayaan dalam jumlah menengah itu berkuasa maka pemerintahan dijalankan berdasarkan aturan hukum karena masyarakat dipaksa hidup dengan bekerja yang tidak bermalas-malasan melaksanakan musyawarah. Mereka memperoleh bagian dalam pemerintahan ketika mereka memiliki kualifikasi yang ditetapkan oleh hukum yang merupakan pengusiran bagi kelas apapun yang mencoba melangkah menuju oligarki. Oleh karena itu, dia yang memiliki kualifikasi kekayaan diperkenankan untuk mengambil bagian dalam konstitusi. Namun, mereka tidak diperbolehkan mendapatkan cuti kecuali ada pajak yang mendukung mereka.
2. Demokrasi kedua: Jenis demokrasi lain yang didasarkan pada perbedaan secara alami: Dalam hal ini, setiap orang yang penyebab kelahirannya tidak bermasalah itu dapat dipilih, tetapi sesungguhnya bagian dalam pemerintahan bisa didapatkannya jika dia bisa menemukan waktu luang.<sup>79</sup> Oleh karena itu, dalam demokrasi seperti itu kekuasaan tertinggi berada di tangan hukum karena negara tidak memiliki cara untuk menggaji warga masyarakatnya.
3. Demokrasi ketiga: ketika semua orang biasa memiliki hak untuk mendapatkan bagian dalam pemerintahan. Dengan demikian, dalam bentuk ini sekali lagi hukum yang berkuasa.

---

<sup>79</sup> Aristoteles, *Politik (La Politica)*, ter. Syamsur Irawan Kharie (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 186.

4. Demokrasi keempat: Pada zaman sekarang, ketika kota-kota telah berkembang pesat jauh melebihi ukuran sebelumnya, dan pajak mereka telah meningkat, seluruh warga masyarakat memiliki tempat di pemerintahan, melalui proporsi mayoritas dalam kemajemukan penduduk. Mereka semua, termasuk orang miskin yang menerima tunjangan sehingga memiliki waktu luang untuk melaksanakan hak-haknya itu berperan dalam mekanisme administrasi kenegaraan. Sesungguhnya, ketika mereka digaji, orang biasa memiliki waktu luang paling banyak, karena mereka tidak terhambat oleh perhatian terhadap kekayaan mereka yang sering membelenggu orang kaya, yang karenanya orang kaya sering tidak dapat ikut serta dalam musyawarah atau pengadilan, sehingga negara dipimpin oleh orang miskin yang merupakan jumlah mayoritas, dan bukan oleh aturan hukum. Jadi, terdapat banyak sekali jenis demokrasi dan semuanya berkembang karena sebab-sebab yang diperlukan.

Di bawah ini ada beberapa bentuk oligarki, yaitu:

- a. Ketika mayoritas penduduk memiliki sebagian harta kekayaan, meskipun tidak banyak.<sup>80</sup> Hal ini memungkinkan siapa saja yang memiliki kualifikasi jumlah harta kekayaan yang tepat itu mendapatkan hak dalam proses pemerintahan. Banyak pelaku dalam pemerintahan yang mengakui bahwa aturan hukum yang memerintah itu bukan individual. Hal ini disebabkan dalam proporsi ketika mereka selanjutnya dibebaskan dari bentuk pemerintahan monarki, dan dalam hal harta kekayaan yang tidak

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 187.

banyak mereka miliki yang hanya bisa hidup tanpa harus bekerja, atau sangat sedikit, sehingga dukungan negara sangat diperlukan, mereka harus mengakui aturan hukum dan tidak memaksakan untuk memerintah sendiri.

- b. Jika orang kaya di dalam negara lebih sedikit dari yang terjadi pada kasus terdahulu dan memiliki harta lebih banyak maka semakin kuat mereka, semakin kuat pula keinginan untuk memerintah. Menanggapi kecenderungan ini, mereka sendiri memilih orang yang berasal dari kelas lainnya untuk menjalankan roda pemerintahan, tetapi karena tidak cukup kuat untuk memerintah tanpa aturan hukum, mereka menjadikan hukum mewakili harapan mereka.
- c. Ketika kekuasaan ini diintensifkan melalui pengurangan jumlah mereka dan memperbesar jumlah kekayaan mereka kemudian kelas yang memerintah mempertahankan jabatan mereka dan hukum menetapkan bahwa sang anak akan menggantikan sang ayah.
- d. Ketika penguasa memiliki harta berlimpah dan kolega yang sangat banyak, jenis depotisme keluarga seperti ini mendekati monarki dengan individual yang memerintah, bukan ketentuan hukum. Ini adalah jenis keempat dari oligarki, dan dalam beberapa hal itu menyerupai jenis terakhir dari demokrasi.

Masih ada dua bentuk lain selain demokrasi dan oligarki, satu diantaranya diakui secara universal dan termasuk diantara empat bentuk asli pemerintahan, yaitu: monarki, oligarki, demokrasi, dan aristokrasi atau bentuk pemerintahan yang terbaik. Sesungguhnya ada juga bentuk kelima, yang mempertahankan nama

umum *polity* atau pemerintahan konstitusional.<sup>81</sup> Istilah aristokrasi secara tepat diterapkan pada bentuk pemerintahan yang dibentuk oleh orang terbaik yang bukan semata-mata orang yang baik saat diuji dengan standar-standar yang diberikan.

Di negara yang sempurna, orang yang baik sama dengan warga negara yang baik, ketika di negara-negara lain, warga negara yang baik hanya baik secara relatif terhadap bentuk pemerintahannya sendiri. Namun, ada beberapa negara yang berbeda dari oligarki dan juga berbeda dari yang disebut dengan *polity* atau pemerintahan konstitusional. Ini diistilahkan dengan aristokrasi yang di dalamnya majelis hakim dipilih berdasarkan kekayaan dan keturunannya. Bentuk pemerintahan seperti itu berbeda dengan pemerintahan yang baru saja disebutkan, sehingga dinamakan aristokrasi. Sesungguhnya di negara-negara yang tidak menetapkan nilai perilaku sebagai tujuan masyarakat, keturunan bangsawan, dan reputasi perilaku mereka dapat ditemukan. Selain itu, ketika pemerintah memperhatikan kekayaan, moralitas perilaku, dan jumlah, seperti di Carthage, itu adalah aristokrasi; serta ketika negara tersebut hanya memperhatikan dua dari tiga elemen, seperti di Lacedaemon, yaitu pada perilaku dan jumlah, serta dua prinsip demokrasi dan nilai perilaku yang saling berkontribusi satu sama lain. Ada dua bentuk aristokrasi, sebagai bagian dari yang pertama dan negara sempurna, serta ada bentuk yang ketiga, misalnya konstitusi yang cenderung melebihi yang disebut dengan *polity* terhadap oligarki.

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 188-189.

Sebelumnya telah dibahas, yaitu: *polity* dan tirani. Sengaja keduanya diletakkan dalam urutan seperti ini, bukan karena sebuah *polity* atau pemerintahan konstitusional dianggap sebagai bentuk yang cacat daripada yang disebut di atas tentang aristokrasi.<sup>82</sup> Mereka merupakan kependekan dari bentuk pemerintahan yang paling sempurna, oleh karena itu mereka dikenali dalam bentuk-bentuk kecacatan tersebut, bahkan merupakan bentuk yang paling cacat daripada yang lain, seperti telah disebutkan dalam diskusi awal.

Tirani ditempatkan di bagian terakhir dari ini karena tampak ada kecenderungan untuk lebih menyukai negara-negara konstitusi. Ini adalah sangat terbalik dengan sebuah konstitusi. Setelah menjelaskan mengapa urutan ini diadopsi, akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan pemerintahan konstitusional yang sifat sesungguhnya akan lebih jelas setelah oligarki dan demokrasi ditentukan. *Polity* atau pemerintahan konstitusional dapat digambarkan secara bebas sebagai sebuah peleburan antara oligarki dan demokrasi. Namun, istilah tersebut biasanya diterapkan pada bentuk-bentuk pemerintahan yang cenderung mengarah pada demokrasi. Sementara itu, istilah aristokrasi diarahkan kepada mereka yang cenderung pada oligarki karena kelahiran dan pendidikan yang merupakan pasangan dari kekayaan. Terlebih lagi, kaum kaya memiliki keuntungan-keuntungan eksternal, seperti keinginan yang menjadi godaan untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, mereka disebut dengan orang terhormat dan bangsawan. Lagipula aristokrasi berupaya memberikan pengaruh yang lebih

---

<sup>82</sup> Aristoteles, *Politik (La Politica)*,...hlm. 189-190.

kuat kepada warga negara terbaik. Masyarakat juga mengatakan bahwa oligarki terdiri dari orang-orang terhormat dan para bangsawan.

Sekarang tampaknya hal itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, karena negara diperintah bukan oleh warga negara terbaiknya, tetapi oleh warga negara biasa dan sekaligus tidak mungkin negara yang pemerintahannya buruk harus diperintah oleh yang terbaik. Namun, harus kita ingat bahwa hukum yang baik, jika tidak ditaati, bukan merupakan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, ada dua bagian dari pemerintahan yang baik, yakni ketaatan warga negara yang sesungguhnya terhadap aturan hukum dan kebaikan aturan hukum dengan para warga negara yang mematuhi. Mereka bisa tunduk terhadap aturan hukum yang buruk dan baik.<sup>83</sup> Mungkin masih ada lagi pembagian subdivisional yang lebih jauh, yakni mereka bisa mematuhi ketentuan hukum terbaik yang dapat mereka peroleh atau yang terbaik secara absolut.

Pembagian posisi jabatan yang tergantung pada kehormatan adalah karakteristik khusus dari aristokrasi karena prinsip aristokrasi adalah nilai, seperti kekayaan dalam oligarki dan kebebasan dalam demokrasi. Secara keseluruhan tentu ada hak mayoritas, dan apapun yang terlihat baik bagi kelompok mayoritas di pemerintahan yang memiliki kekuasaan. Di kebanyakan negara, bentuk yang disebut *polity* itu ada karena upaya peleburan yang tidak lebih dari usaha menggabungkan kebebasan kelompok miskin dengan kelompok kaya, yang biasanya disebut kelas bangsawan. Disebabkan ada tiga dasar orang menyatakan memiliki bagian yang sama dalam pemerintahan, kebebasan, kekayaan, dan

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 191-192.

perilaku (karena yang keempat atau keturunan yang baik adalah sebagai hasil dari dua yang terakhir, hanya sebagai kekayaan dan nilai kuno), jelas bahwa percampuran dari dua elemen tersebut, yaitu yang kaya dan miskin, disebut dengan *polity* atau pemerintahan konstitusional dan penggabungan dari ketiganya disebut dengan aristokrasi atau bentuk pemerintahan yang terbaik, melebihi bentuk-bentuk pemerintahan yang lain, kecuali bentuk pemerintahan yang sesungguhnya dan ideal, yang memiliki hak atas penggunaan nama tersebut. Sejauh ini telah ditunjukkan keberadaan bentuk-bentuk negara selain monarki, demokrasi, dan oligarki. Selain itu, apa sesungguhnya bentuk-bentuk tersebut dan dalam hal apa aristokrasi berbeda dari yang lain, serta perbedaan *polity* dari aristokrasi.<sup>84</sup>

Selanjutnya kita harus mempertimbangkan bagaimana oligarki, demokrasi, dan *polity*, atau pemerintahan konstitusional, serta bagaimana pemerintahan tersebut diorganisasikan. Karakter tersebut akan segera dipahami dari perbedaan antara oligarki dan demokrasi. Kita harus memahami perbedaan karakteristiknya, melihat keduanya secara proporsional, meletakkan keduanya secara bersamaan, seperti bagian-bagian dalam *indenture*. Ada tiga modus ketika peleburan bentuk pemerintahan terkena pengaruhnya:

1. Dalam modus pertama kita harus mengkombinasikan aturan hukum yang dibuat oleh kedua pemerintahan, yaitu tentang administrasi pengadilan. Di dalam oligarki mereka mengenakan denda kepada orang kaya jika tidak mau menjalankan fungsi sebagai hakim dan tidak mendermakan hartanya

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 192-193.

kepada orang miskin. Namun, dalam demokrasi mereka menderma kaum miskin dan tidak menderma kaum kaya. Sekarang gabungan dari dua modus tersebut adalah istilah umum di antara mereka, sehingga merupakan karakteristik sebuah pemerintahan konstitusional karena merupakan kombinasi dari keduanya. Ini adalah satu modus yang menggabungkan keduanya.

2. Modus kedua, yaitu: Sebuah rata-rata yang diambil antara pemberlakuan keduanya, sehingga demokrasi tidak memerlukan kualifikasi harta kekayaan atau hanya sebagian kecil dari anggota majelis, sedangkan oligarki menghendaki bagian terbesar. Disini tidak satu pun merupakan istilah umum, tetapi rata-rata di antara mereka.
3. Modus ketiga, yaitu: ada prinsip yang dipinjam dari oligarki dan demokrasi, misalnya: penunjukan anggota hakim yang dilakukan dengan pemungutan suara dianggap lebih demokratis, sedangkan yang dilakukan dengan pemilihan lebih oligarkis. Dianggap demokratis jika tidak ada kualifikasi harta kekayaan, padahal oligarkis mengenakan kualifikasi tersebut. Di negara aristokratis atau konstitusional, salah satu elemen yang diambil dari masing-masing, yaitu dari oligarki adalah prinsip pemilihan untuk jabatan tertentu dan dalam demokrasi itu prinsip tidak menentukan kualifikasi. Itu semua adalah jenis modus kombinasi.<sup>85</sup>

Ada sebuah gabungan murni dari oligarki dan demokrasi ketika negara yang sama diberi nama demokrasi atau oligarki. Negara yang menggunakan dua

---

<sup>85</sup> Aristoteles, *Politik (La Politica)*,...hlm. 193-194.

nama jelas merasa proses peleburan tersebut telah selesai. Peleburan tersebut berlaku juga rata-rata karena kedua sifat ekstrem tampak di dalamnya. Misalnya, konstitusi Lacedaemonia sering digambarkan sebagai sebuah demokrasi karena memiliki banyak fitur demokrasi. Pada awalnya, anak muda menerima pendidikan demokrasi. Anak dari keluarga miskin dididik bersama anak dari keluarga kaya. Keduanya dididik dengan cara tertentu sehingga anak dari keluarga miskin juga mendapat kualifikasi pendidikan yang sama. Kesetaraan yang serupa juga muncul dalam periode kehidupan berikutnya, dan ketika warga negara tumbuh menjadi dewasa, aturan yang sama diberlakukan, yakni tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin. Demikian juga dalam hal makan makanan, mereka makan makanan yang sama di atas meja yang sama dan yang kaya mengenakan pakaian yang mampu dibeli oleh orang miskin. Sekali lagi, masyarakat memilih satu dari dua pejabat tertinggi negara, dan dalam hal lain mereka saling membantu karena mereka memilih para senator dan bekerja sama dalam *ephoralty*.

Ada yang berpendapat bahwa konstitusi Sparta disebut dengan oligarki, karena terdapat banyak elemen yang bersifat oligarkis. Bahwa semua jabatan diisi melalui pemilihan yang tidak melalui pemungutan suara, adalah salah satu dari karakteristik oligarki. Kekuasaan untuk menghukum mati atau mengasingkan seseorang itu terletak di tangan beberapa pejabat adalah hal yang lain. Dalam sebuah *polity* yang berhasil seharusnya tampak kedua elemen tersebut, tetapi tidak satupun yang muncul. Pemerintah harus bersandar pada diri sendiri, bukan pada bantuan asing dan juga bukan melalui itikad baik dari kelompok mayoritas, tetapi melalui kehendak umum dari semua kelas dalam negara guna menjaga

keberlangsungan konstitusi karena mereka bisa sangat perhatian ketika ada bentuk pemerintahan yang sangat buruk.<sup>86</sup>

Sifat dari tirani perlu dibicarakan kembali agar mendapat posisi dalam pertanyaan kita (karena tirani kita kenal sebagai salah satu bentuk pemerintahan), meskipun tidak banyak yang dapat dikatakan tentangnya. Di bagian awal diskusi panjang ini, telah dipaparkan tentang keluarga raja atau ke-raja-an menurut arti yang paling umum, dan mempertimbangkan apakah bermanfaat bagi negara, serta jenis kerajaan apa yang perlu dibentuk, dari sumber mana, dan bagaimana. Ketika berbicara tentang keluarga raja, kita juga membicarakan dua bentuk tirani yang berdasarkan hukum sehingga mudah diterima oleh keluarga raja. Di antara kaum barbar itu terdapat sekelompok kaum monarkis terpilih yang menerapkan kekuasaan secara despotis. Para penguasa despotis juga dipilih pada masa Hellas yang disebut dengan *aesymnetes* atau diktator. Kaum monarki tersebut jika dibandingkan satu dengan lainnya itu menunjukkan adanya perbedaan. Sebagaimana telah disebutkan, mereka memiliki hubungan dengan raja sejauh mereka memerintah sesuai dengan aturan hukum terhadap warga negara yang tunduk. Namun, mereka bersifat tirani sejauh mereka menjalankan sifat despotis dan memerintah berdasarkan kesenangannya sendiri. Ada pula bentuk ketiga dari tirani, yang merupakan bentuk paling tipikal dan merupakan mitra dari monarki yang sempurna. Tirani ini memiliki kekuasaan arbitrer individual yang tidak bertanggung jawab kepada siapapun dan memerintah semuanya, baik terhadap mereka yang setara maupun yang lebih unggul demi kepentingan pribadi, bukan

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 194-195.

demi warganya yang jelas-jelas berlawanan dengan kehendak warga masyarakatnya. Meskipun dapat melepaskan diri dari sistem ini, tidak ada seorang manusia bebas manapun yang tahan terhadap sistem pemerintahan seperti ini.<sup>87</sup>

### **I. Tipe Konstitusi yang Umumnya Paling Dapat Dipraktikkan**

Sekarang kita harus mempertimbangkan apakah konstitusi terbaik dan cara hidup terbaik bagi mayoritas kota dan manusia. Untuk itu kita tidak akan memakai standar mutu sangat baik yang berada di luar jangkauan orang biasa, atau standar pendidikan yang memerlukan bakat-bakat dan perlengkapan luar biasa, atau standar konstitusi yang mencapai suatu tingkat ideal. Kita akan mempertimbangkan hanya jenis kehidupan yang dapat dicapai sebagian besar orang dan jenis konstitusi yang mungkin dinikmati oleh sebagian besar kota. Apa yang disebut “Aristokrasi”, yang baru saja kita bicarakan, terletak pada suatu ekstrem yang berada di luar jangkauan sebagian besar kota-kota, atau sangat dekat dengan apa yang disebut “pemerintahan konstitusional” atau *polity*, sehingga keduanya dapat dianggap sebagai suatu bentuk yang tunggal.

Bentuk terbaik asosiasi politis adalah bentuk dimana kekuasaan diberikan pada kelas menengah, dan pemerintahan yang baik dapat dicapai di kota-kota dimana terdapat banyak kelas menengah. Jika mungkin, lebih kuat daripada kedua kelas lainnya, tetapi setidaknya cukup besar untuk menjadi lebih kuat

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 196-197.

daripada keduanya atau dari mereka satu persatu, karena di dalam kasus itu penggabungannya dengan kelas yang lain akan cukup untuk mengubah skala, dan akan mencegah kedua ekstrem yang bertentangan untuk menjadi dominan. Oleh karena itu, anugerah terbesar bagi sebuah kota ialah bahwa para anggotanya harus memiliki suatu harta benda yang sedang dan memadai. Di tempat dimana sebagian orang mempunyai hak milik yang sangat banyak, dan yang lain tidak punya apa-apa sama sekali, hasilnya adalah suatu demokrasi ekstrem atau oligarki yang tidak berbaur, atau mungkin bahkan, sebagai akibat eksekutif kedua sisi itu munculnya suatu tirani. Tirani menyingkirkan tipe demokrasi yang paling tidak matang, atau menyingkirkan oligarki, tetapi agak sering menyingkirkan konstitusi yang berada di urutan pertengahan, atau konstitusi yang dekat dengannya. Sementara itu, jelaslah bahwa tipe pertengahan konstitusi adalah yang terbaik. Ia adalah tipe yang bebas dari faksi; dimana terdapat kelas menengah yang besar, di situ kecil kemungkinan ada faksi dan pertikaian-pertikaian daripada dalam konstitusi lain. Kota-kota besar pada umumnya lebih bebas dari faksi hanya karena mereka mempunyai kelas menengah yang besar. Di sisi lain, di dalam kota-kota kecil itu mudah bagi seluruh populasi untuk terbagi ke dalam dua kelas saja, tidak ada yang tersisa di kelas menengah atau nyaris semuanya adalah miskin atau kaya. Demokrasi pada umumnya lebih aman dan permanen daripada oligarki karena ada kelas menengahnya. Kelas ini lebih banyak jumlahnya, dan mendapat bagian yang lebih besar untuk jabatan dan kehormatan, daripada yang ada di dalam oligarki. Dimana demokrasi tidak

mempunyai kelas menengah, dan orang miskin sangat banyak jumlahnya maka terjadilah kesulitan kemudian ia akan runtuh dengan cepat.<sup>88</sup>

Pertimbangan-pertimbangan tersebut membantu kita dalam memahami mengapa pemerintah berbentuk demokrasi atau oligarki. Alasannya adalah bahwa kelas menengah sering berjumlah banyak dan dari golongan manapun, baik kaya maupun orang biasa, yang melampaui rata-rata dan berjumlah lebih besar, menciptakan konstitusi berdasarkan kehendak sendiri, dan akhirnya memunculkan oligarki atau demokrasi. Ada alasan lain, yaitu yang miskin dan kaya bertengkar dan salah satu pihak keluar sebagai pemenang, bukannya membentuk sebuah pemerintahan yang populer dan adil, tetapi lebih melihat pada supremasi politik sebagai hadiah kemenangan dan yang satu menetapkan demokrasi, sedangkan yang lain menetapkan oligarki. Mereka memikirkan keuntungan yang mereka dapatkan, bukan manfaat bagi masyarakat. Dikarenakan alasan-alasan tersebut, bentuk pemerintahan menengah itu jarang terbentuk, itu pun jika ada, jumlahnya sangat sedikit. Kemudian jelaslah apa yang menjadi bentuk pemerintahan yang terbaik dan apa yang membuatnya menjadi yang terbaik, dan dari konstitusi lainnya, karena kita mengatakan bahwa terdapat banyak jenis demokrasi dan oligarki, tidaklah sulit melihat siapa yang mendapatkan posisi pertama, kedua, atau posisi lainnya dalam urutan keunggulan, kita bisa memutuskan mana yang terbaik. Bagi yang mendekati terbaik haruslah lebih baik, yang sekaligus terjauh dari yang paling buruk, jika kita membuat penilaian secara absolut, bukan secara relatif, terhadap kondisi-

---

<sup>88</sup> Aristoteles, *politik*,...hlm. 194-195.

kondisi yang ada. Saya katakan, “secara relatif terhadap kondisi-kondisi yang ada” karena ada jenis pemerintahan tertentu yang cenderung, seperti itu dan ada pula bentuk lain yang mungkin dirasakan lebih baik oleh sebagian orang.

Sekarang kita harus mempertimbangkan jenis pemerintahan yang cocok untuk suatu keadaan dan masyarakat. Kita mungkin memulai dengan asumsi, sebagai sebuah prinsip umum yang berlaku bagi semua pemerintah, bagian negara yang menghendaki sifat konstitusi yang permanen haruslah lebih kuat daripada keinginan yang sebaliknya. Hunian setiap kota terdiri dari kualitas dan kuantitas.<sup>89</sup> Kualitas adalah kebebasan, pemilikan harta, pendidikan, kelahiran yang baik. Kuantitas adalah superioritas jumlah penduduk. Kualitas mungkin ada dalam salah satu kelas yang membentuk negara dan kuantitas ada pada yang lainnya. Misalnya, status kelahiran rata-rata atau umum mungkin berjumlah lebih banyak daripada yang berstatus kelahiran baik, atau yang miskin lebih banyak daripada yang kaya, tetapi mungkin jumlah mereka tidak terlalu banyak karena kualitasnya rendah. Oleh karena itu, harus ada perbandingan tentang kuantitas dan kualitas. Jika jumlah masyarakat miskin melebihi proporsi harta kekayaan mereka yang kaya, secara alamiah akan tumbuh sebuah demokrasi yang beragam dalam bentuk berupa jenis-jenis orang yang berada di dalamnya. Misalnya, jika jumlah petani sangat banyak, bentuk pertama demokrasi akan muncul. Jika kelas pengrajin dan kelas pekerja yang lebih banyak, bentuk demokrasi terakhir yang muncul. Demikian juga dengan bentuk-bentuk di antara keduanya. Namun, ketika mereka yang kaya dan terhormat berjumlah lebih banyak dalam kualitas daripada

---

<sup>89</sup> Aristoteles, *Politik (La Politica)*,...hlm. 201-203.

kuantitas, akan muncul oligarki. Sama halnya dengan mengasumsikan keragaman bentuk lainnya sesuai dengan jenis superioritas yang dimiliki oleh kaum oligarkis.

Legislator harus selalu memperhatikan kelas menengah dalam pemerintahannya. Jika dia membuat aturan hukum yang bersifat oligarkis, dia harus merujuk kepada kelas menengah. Jika dia membuat aturan hukum yang bersifat demokratis, dia harus berusaha menurut ketentuan hukumnya menyertakan kelas ini kepada negara. Pemerintahan hanya akan bisa stabil jika kelas menengah mengungguli salah satu atau kedua kelas lainnya. Dalam hal ini tidak akan ada kekhawatiran bahwa yang kaya akan bersatu dengan yang miskin untuk mengadakan perlawanan terhadap pemerintah.<sup>90</sup> Tidak satupun dari kelas-kelas tersebut bersedia melayani yang lain dan jika mereka mencari bentuk pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan mereka semua, mereka tidak akan menemukan bentuk yang lebih baik daripada ini karena baik yang kaya maupun miskin tidak akan bersedia memerintah secara bergantian karena adanya rasa saling tidak mempercayai satu sama lainnya. Penasihat adalah seseorang yang selalu dipercaya dan dia yang berada di tengah disebut dengan seorang *arbriter*. Semakin sempurna perpaduan elemen-elemen politik, semakin bertahan lama sebuah konstitusi. Banyak di antara mereka yang berkeinginan membentuk pemerintahan aristokratis itu membuat kesalahan yang tidak hanya memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada kaum yang kaya, tetapi juga berupaya sekuat tenaga untuk menguasai seluruh masyarakat. Ada saatnya muncul

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 203-205.

kejahatan, karena keserakahan kaum yang kaya cenderung lebih destruktif terhadap konstitusi daripada kelompok masyarakat yang lain.

Sarana yang digunakan kaum oligarki untuk mengelabui masyarakat secara umum ada lima jenis, yaitu yang terkait dengan: musyawarah, majelis hakim, sidang pengadilan, penggunaan tentara, dan kegiatan olahraga.

1. Kegiatan musyawarah diselenggarakan secara terbuka dengan setiap warga, tetapi hanya yang kaya yang akan dikenakan denda jika mereka tidak menghadiri kegiatan tersebut atau denda yang lebih besar lagi agar mereka menjadi tidak nyaman.
2. Untuk majelis hakim, mereka yang berkualifikasi berdasarkan ketentuan tentang harta kekayaan tidak dapat menolak jabatan atas sumpah, kecuali untuk mereka yang miskin.<sup>91</sup>
3. Dalam sidang pengadilan kelompok yang kaya, hanya yang kaya yang akan dikenakan denda jika mereka tidak menjalankan tugasnya, sedangkan yang miskin dibebaskan dari hukuman atau seperti dalam ketentuan Charondas, yaitu: denda dalam jumlah besar dikenakan kepada yang kaya dan denda ringan dikenakan kepada yang miskin. Di beberapa negara, setiap warganya yang terdaftar itu diizinkan menghadiri musyawarah dan mengadili kasus-kasus. Namun, jika setelah registrasi dilakukan ternyata mereka tidak menghadiri musyawarah atau sidang pengadilan, hukuman berupa denda terberat akan dikenakan kepada mereka. Tujuannya, melalui ketakutan terhadap denda, mereka tidak akan

---

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 205.

mendaftarkan diri sehingga mereka tidak akan bisa duduk di kursi musyawarah atau di sidang pengadilan.

Mengenai pemilikan senjata (4) dan kegiatan olahraga (5), mereka mengaturnya dalam pola dan semangat yang sama. Kelompok yang miskin tidak diwajibkan memiliki senjata, tetapi yang kaya akan terkena denda jika tidak memilikinya. Demikian juga tidak ada hukuman yang diberikan kepada mereka yang miskin karena tidak mengikuti kegiatan di ruang olahraga. Sebagai konsekuensinya, karena tidak memiliki kekhawatiran maka mereka tidak menghadirinya, sedangkan yang kaya dikenai denda jika tidak ikut serta, sehingga mereka terpaksa hadir.

Ini semua adalah sarana yang digunakan oleh para legislator oligarkis, dan dalam demokrasi, mereka memiliki sarana yang berlawanan. Mereka membayar kaum miskin untuk menghadiri musyawarah dan sidang pengadilan, serta tidak memberikan hukuman kepada kaum kaya yang tidak menghadiri kedua kegiatan tersebut. Terlihat jelas bahwa dia yang secara tepat memadukan kedua prinsip itu harus mengkombinasikan praktik dari keduanya, sepanjang yang miskin dibayar untuk menghadiri dan yang kaya didenda jika tidak menghadiri kemudian mereka semua akan ikut serta. Jika tidak ada kombinasi seperti itu, kekuasaan akan berada di tangan satu pihak saja. Pemerintah harus menahan mereka yang membawa senjata.<sup>92</sup> Untuk kualifikasi harta kekayaan, tidak ada aturan absolut yang dapat ditetapkan, tetapi kita harus melihat kualifikasi tertinggi seperti apa yang cukup komprehensif guna memastikan bahwa jumlah mereka yang memiliki hak-hak

---

<sup>92</sup> Aristoteles, *Politik (La Politica)*,...hlm. 206-207.

kewarganegaraan melebihi jumlah mereka yang dikecualikan. Bahkan, jika merasa tidak memiliki andil dalam jabatan, yang miskin tidak akan bergeming jika tidak dibuat marah atau harta mereka tidak dirampas.

Untuk memastikan perlakuan yang baik kepada yang miskin adalah sesuatu yang tidak mudah karena kelas penguasa tidak selalu manusiawi. Pada masa perang, yang miskin cenderung ragu, kecuali jika mereka diberi makan. Ketika diberi makan, mereka berani berperang. Di beberapa negara, pemerintah memberikan kewenangan, bukan hanya kepada mereka yang bekerja melayani negara, tetapi juga kepada mereka yang pernah memberikan pelayanannya kepada negara. Misalnya, di antara kaum Malian, tubuh pemerintah terdiri dari yang terakhir, sementara itu, majelis hakim dipilih dari mereka yang benar-benar mengabdikan. Pada masa awal pemerintahan yang muncul di antara bangsa Hellena, setelah menggulingkan kekuasaan raja, tumbuhlah kelas prajurit yang sesungguhnya diambil dari kalangan ksatria, (karena kekuatan dan superioritas dalam peperangan pada masa itu bergantung pada kekuatan kavaleri. Sesungguhnya tanpa adanya disiplin, infanteri tidak bermanfaat dan pada masa lampau tidak ada pengetahuan atau taktik militer, sehingga kekuatan bersenjata hanya terletak pada kavaleri). Namun, ketika kota-kota berkembang dan prajurit bersenjata berat semakin berkembang maka semakin banyak orang yang berperan di pemerintahan. Inilah alasan negara-negara yang kita sebut sebagai pemerintahan konstitusional akhirnya disebut dengan demokrasi. Konstitusi kuno, seperti yang diperkirakan, bersifat oligarkis dan berbau kerajaan. Populasi mereka

sedikit sehingga mereka tidak memiliki kelas menengah. Masyarakatnya lemah dalam jumlah dan organisasi sehingga cenderung ingin diperintah.<sup>93</sup>

#### **J. Metode-metode Penetapan Konstitusi, Dalam Hubungannya Dengan Tiga Kekuasaan: Pertimbangan, Eksekutif, dan Yudisial**

Setelah mendapatkan basis diskusi yang cukup kuat, kita lanjutkan dengan berbicara mengenai beberapa perihal secara berurutan. Kita akan mempertimbangkan subjek itu bukan hanya secara umum, tetapi juga dengan referensi pada konstitusi-konstitusi tertentu. Semua konstitusi memiliki tiga elemen, sehingga pembuat aturan hukum harus memperhatikan keperluan setiap konstitusi. Ketika sudah tertata dengan baik dan berbeda satu dengan lainnya, konstitusi-konstitusi tersebut menjadi tidak sama. Ada:

- 1) elemen yang memperhatikan masalah-masalah publik.
- 2) Yang berkaitan dengan majelis hakim (pertanyaannya adalah, mereka seharusnya menjadi apa? Untuk masalah apa mereka harus menerapkan kekuasaannya? Dan apa yang sebaiknya menjadi modus pemilihan mereka?)
- 3) Yang memiliki kekuasaan yudisial.

Elemen deliberatif memiliki kekuasaan dalam persoalan perang dan damai, serta dalam membentuk dan membubarkan aliansi. Elemen tersebut melangkahi aturan hukum, menetapkan hukuman mati, pengasingan, konfiskasi,

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 207-208.

memilih majelis hakim, dan mengaudit keuangan mereka. Kekuasaan-kekuasaan ini harus diserahkan kepada seluruh warga negara atau beberapa orang dari mereka (misalnya, kepada satu atau beberapa orang hakim, atau sebab-sebab yang berbeda, kepada hakim-hakim yang berbeda pula), atau sebagian dari kekuasaan tersebut untuk semua orang, serta beberapa di antaranya hanya kepada beberapa orang.<sup>94</sup> Semua ini harus diputuskan berdasarkan pertimbangan berbagai karakteristik demokrasi. Ini adalah jenis kesetaraan yang diinginkan warga masyarakat. Namun, ada banyak cara ketika semua orang dapat berperan dalam pemerintahan. Semua cara tersebut dapat dilakukan, bukan semuanya oleh satu orang, tetapi secara bergantian, seperti dalam konstitusi Telecles dari Milesian.

Ada konstitusi yang lain, yakni majelis hakim bertemu dan melakukan kegiatannya, memegang kekuasaan secara bergantian, serta dipilih dari berbagai suku bangsa yang merupakan pembagian terkecil dari negara sehingga pada gilirannya masing-masing orang dapat berkuasa. Sebaliknya, warga negara berkumpul hanya bertujuan untuk membuat kesepakatan hukum, berkonsultasi tentang konstitusi, dan mendengarkan keputusan yang dibacakan majelis hakim. Jenis demokrasi yang lain adalah masyarakat membentuk satu badan musyawarah, tetapi hanya bertemu ketika akan memilih anggota hakim, memproses persetujuan aturan hukum, memberikan nasihat perang, dan melakukan pemeriksaan. Permasalahan-permasalahan yang lain beberapa kali dirujuk pada hakim-hakim khusus yang dipilih melalui pemungutan suara atau

---

<sup>94</sup> Aristoteles, *Politik (La Politica)*,... hlm. 209.

melalui sepotong kertas oleh seluruh warga negara, atau melalui sepotong kertas oleh seluruh warga negara, atau sekali lagi, warga masyarakat bertemu untuk memilih pejabat dan melakukan pemeriksaan, serta memikirkan tentang perang atau persekutuan, sedangkan urusan-urusan lainnya ditangani oleh majelis hakim yang sejauh mungkin dipilih melalui pemungutan suara. Disini para hakim harus memiliki pengetahuan yang khusus. Bentuk keempat demokrasi adalah ketika seluruh warga negara bertemu untuk membicarakan berbagai hal dan majelis hakim tidak memberikan keputusan, tetapi hanya mencari informasi, dan ini adalah cara dalam bentuk demokrasi yang terakhir dan yang paling buruk karena memiliki kesamaan dengan oligarki kekeluargaan dan tirani yang diterapkan. Semua modus tersebut bersifat demokratis.

Sebaliknya, ada sebagian orang yang harus memikirkan segala sesuatu yang bersifat oligarkis. Sekali lagi, ini merupakan modus seperti sifat demokratis yang memiliki banyak bentuk. Ketika kelas pemikir yang dipilih dari mereka yang memiliki kualifikasi moderat itu berjumlah banyak maka menghormati dan mematuhi larangan-larangan hukum tanpa berupaya mengubahnya, serta siapapun yang memenuhi kualifikasi tersebut dan ikut ambil bagian dalam pemerintahan maka oligarki cenderung menjadi *polity*. Namun, ketika beberapa individu terpilih ikut serta dalam memikirkan negara maka pemerintahan tersebut adalah murni oligarki meskipun mereka juga memperhatikan aspek-aspek hukum atau sekali lagi, ketika mereka yang memiliki kekuasaan sebagai pemikir dipilih sendiri, seperti anak menggantikan ayahnya, bukan hukum yang berkuasa maka pemerintahan tersebut pastilah oligarkis. Ketika orang-orang tertentu memiliki

kewenangan dalam hal-hal khusus, misalnya ketika seluruh warga masyarakat memutuskan perang atau damai dan melakukan pemeriksaan, sedangkan majelis hakim mengatur perihal yang lain dan mereka dipilih secara aklamasi maka pemerintahannya adalah aristokrasi. Jika beberapa permasalahan diputuskan oleh anggota majelis hakim yang dipilih melalui pemungutan suara, sedangkan anggota majelis hakim lainnya dipilih berdasarkan sepotong kertas, baik absolut maupun dipilih sebagian melalui pemungutan suara dan sebagian lagi melalui sepotong kertas, praktik semacam ini sebagian merupakan karakteristik pemerintahan aristokratis dan sebagian bersifat pemerintahan konstitusional murni.

Semua ini adalah bentuk badan pemikir. Mereka selaras dengan bentuk-bentuk pemerintahan, dan pemerintahan masing-masing negara diatur menurut satu atau beberapa prinsip yang telah ditetapkan. Ini demi demokrasi menurut pengamatan yang ada (saya berbicara tentang bentuk ekstrem dari demokrasi pada saat masyarakat lebih berkuasa, bahkan melebihi ketentuan hukum), dengan tujuan mendapatkan pemahaman lebih baik dalam mengadopsi kebiasaan oligarki dalam menghormati sidang pengadilan.<sup>95</sup> Dalam oligarki, mereka yang kaya dan berkeinginan menjadi hakim, dipaksa untuk hadir dibawah ancaman denda, sedangkan dalam demokrasi, warga yang miskin dibayar untuk menghadirinya. Praktik oligarki semacam ini perlu diadopsi oleh demokrasi dalam musyawarah publiknya, karena mereka dapat memberikan pendapat secara lebih baik jika mereka memikirkan permasalahan secara bersama (masyarakat bersama kelas

---

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 210-212.

terhormat dan kelas terhormat bersama masyarakat) juga merupakan sebuah rencana yang baik jika mereka yang berpikir memilih melalui pemungutan suara secara langsung atau melalui sepotong kertas dengan jumlah orang yang sama dari berbagai kelas.

Jika anggota masyarakat melampaui jumlah mereka yang memiliki pengetahuan tentang politik, perhatian tidak diberikan kepada mereka semua, tetapi hanya kepada kelompok orang yang berjumlah sama dengan jumlah warga kelas terhormat, atau jumlah yang merupakan kelebihan harus dikurangi melalui sepotong kertas. Namun, di dalam oligarki terdapat orang-orang tertentu yang diambil dari masyarakat sebagai anggota atau dari kelas pejabat terdapat beberapa orang yang ditunjuk seperti yang terjadi di beberapa negara, yang dinamakan *probuli* dan penegak hukum. Disini warga negara harus memikirkan secara eksklusif berbagai perihal yang telah ditelaah sebelumnya. Dengan demikian, masyarakat akan bersama-sama memikirkan negara yang tidak mengganggu prinsip-prinsip konstitusi. Sekali lagi, dalam oligarki, masyarakat diharuskan menerima kebijakan-kebijakan pemerintah atau tidak melanggar aturan yang ada atau jika seluruh warga negara diperbolehkan ikut serta sebagai penasihat, keputusan harus berada di tangan majelis hakim. Segala sesuatu yang berlawanan yang dilakukan di pemerintahan konstitusional seharusnya menjadi aturan dalam oligarki. Veto yang diberikan mayoritas bersifat final, kesepakatan mereka tidak final, tetapi usulan harus dikembalikan kepada majelis hakim. Di pemerintahan konstitusional, mereka berjalan dengan arah yang berlawanan. Segelintir orang memiliki kekuasaan negatif, bukan bersifat afirmatif. Kekuasaan

afirmatif hanya berada di tangan khalayak ramai. Semua hal yang telah diuraikan adalah kesimpulan kita tentang kelompok pemikir, yaitu elemen tertinggi dalam negara.<sup>96</sup>

Kita akan melanjutkan dengan mempertimbangkan distribusi jabatan. Sebagai bagian dari politik dengan banyak pertanyaan dikemukakan, seperti berapa seharusnya jumlah mereka? Terhadap apa mereka akan memimpin dan berapa lama tugas mereka diemban? Kadang kala jabatan mereka berlangsung selama enam bulan, kadang-kadang kurang dari enam bulan, juga kadang-kadang selama setahun. Sementara itu, dalam kasus lain, jabatan-jabatan tersebut dipegang untuk jangka waktu selamanya atau bertahun-tahun. Jika hanya untuk jangka waktu pendek, haruskah orang yang sama memegang jabatan tersebut berkali-kali atau hanya sekali? Juga tentang penunjukan mereka, dari mana mereka dipilih, oleh siapa, dan bagaimana? Pertama, kita harus dalam posisi untuk mengatakan jenis-jenis yang ada dalam jabatan tersebut, kemudian bisa berlanjut dengan menentukan mana yang sesuai dengan bentuk-bentuk pemerintahan yang berbeda. Namun, apa saja yang perlu dimasukkan dalam istilah “jabatan”? Ini pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Sebuah masyarakat politik memerlukan banyak pejabat dan tidak setiap orang yang dipilih melalui pemungutan suara langsung atau sepotong kertas itu dianggap sebagai penguasa. Pada awalnya ada kaum pendeta, yang harus dibedakan dari pejabat politik, pemimpin paduan suara, dan pembawa pesan, bahkan duta-duta besar, yang dipilih melalui pemungutan suara. Beberapa tugas pengawasan adalah bersifat

---

<sup>96</sup> Aristoteles, *Politik (La Politica)*,...hlm. 212-213.

politis yang mencakup seluruh masyarakat dalam lingkup kegiatan tertentu, seperti jenderal yang mengawasi mereka ketika berada di lapangan, atau bagian tertentu dari mereka, seperti peninjau urusan perempuan dan pemuda. Beberapa jabatan lainnya berkaitan dengan manajemen rumah tangga. Ada pula jabatan-jabatan lain yang tidak penting, yakni yang kaya mempekerjakan budak-budaknya. Secara umum, itu semua disebut dengan jabatan yang bertugas memikirkan langkah-langkah tertentu, menilai, dan memerintah. Tugas memerintah adalah tugas khusus dari seorang hakim.

Apakah jenis-jenis jabatan tersebut, berapa banyak, apakah jabatan-jabatan tersebut diperlukan bagi keberadaan sebuah negara dan jika memang tidak diperlukan, keberadaannya sangat penting untuk dipertimbangkan karena berpengaruh pada seluruh konstitusi, khususnya terhadap negara-negara kecil? Di negara-negara besar hal itu memungkinkan, bahkan sangat diperlukan, bahwa setiap jabatan harus memiliki fungsi khusus, yakni ketika jumlah warga negara sangat banyak dan banyak dari mereka yang dapat memegang tampuk jabatan. Ada beberapa jabatan yang dipegang seseorang untuk kedua kalinya setelah melalui interval waktu yang cukup lama, sedangkan jabatan lainnya dipegang hanya satu kali. Tentunya, setiap pekerjaan dapat dilakukan secara lebih baik oleh satu orang, dan bukan dengan membagi perhatian pada pekerja.<sup>97</sup>

Di sisi lain, di negara-negara kecil, sejumlah besar fungsi harus ditumpuk di tangan segelintir orang saja. Jumlah warga negara yang sedikit membuatnya sulit bagi banyak orang untuk menjabat secara bersama-sama, dan jika mereka

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 214-215.

menjabat secara bersama-sama, siapa yang akan menjadi penggantinya? Memang benar bahwa negara-negara kecil kadang-kadang membutuhkan jabatan-jabatan yang sama, dan hukum-hukum yang sama, seperti negara-negara besar, akan tetapi juga benar bahwa negara-negara besar mempunyai kebutuhan yang berulang kali akan jabatannya sementara negara-negara kecil membutuhkannya hanya dalam jarak waktu yang sama. Dengan demikian, tidak ada alasan mengapa negara-negara kecil tidak boleh memaksakan sejumlah tugas secara serempak, supaya mereka tidak saling mengganggu.

Jika kita dapat mengatakan berapa banyak jabatan yang pasti diperlukan di dalam setiap negara, dan berapa banyak bernilai, meskipun tidak diperlukan, orang yang mengetahui hal ini akan dapat menggabungkan dengan mudah, jabatan-jabatan mana yang harus digabungkan menjadi satu jabatan. Di samping itu, kita tidak boleh lalai untuk mempertimbangkan masalah-masalah mana yang memerlukan perhatian jabatan-jabatan yang berbeda di tempat yang berbeda-beda, dan masalah-masalah mana yang harus dikendalikan oleh satu jabatan dengan pertanggungjawaban yang menyeluruh. Pemeliharaan ketertiban adalah suatu contoh: haruskah ada satu orang untuk memelihara ketertiban di sebuah pasar dan orang lain di pasar yang lain, atau haruskah seorang saja yang memelihara ketertiban dimana-mana. Kini juga harus mempertimbangkan, apakah fungsi-fungsi itu harus dialokasikan menurut masalah yang ditangani, atau menurut jenis-jenis orang yang ditangani, misalnya: haruskah ada seorang pejabat untuk seluruh masalah pemeliharaan ketertiban, ataukah seorang pejabat tersendiri untuk anak-anak dan pejabat lain untuk wanita?

Kita juga harus memperhitungkan perbedaan konstitusi-konstitusi. Apakah skema jabatan-jabatan bervariasi dari satu konstitusi ke konstitusi lainnya, ataukah ia sama untuk semuanya? Apakah jabatan-jabatan yang sama membentuk pemerintahan di dalam demokrasi, oligarki, aristokrasi, dan monarki, dengan satu perbedaan bahwa orang yang memegang jabatan tidak berasal dari kelas yang sama, tetapi ditarik dari kelas yang berbeda yang ada pada masing-masing konstitusi yang berbeda (di dalam aristokrasi, misalnya: dari kelas terpelajar; di dalam oligarki dari orang kaya; dan di dalam demokrasi dari orang yang dilahirkan merdeka)? Atau apakah beberapa jenis jabatan ada sebagai hasil dari perbedaan-perbedaan ini sehingga dalam beberapa kasus, jabatan-jabatan yang sama sesuai, tetapi di dalam kasus-kasus lain, mereka pasti berbeda?<sup>98</sup> Barangkali tepat, misalnya: di dalam beberapa konstitusi itu jabatan-jabatan harus kuat, sementara di dalam konstitusi lain jabatan-jabatan yang sama harus lemah.

Memang benar, beberapa jabatan seluruhnya khas untuk satu tipe konstitusi. Majelis persiapan (*probouloie*) adalah sebuah contoh. Badan seperti itu tidak demokratis, sementara majelis biasa atau *boule*, bersifat demokratis. Memang harus ada sejenis badan yang melaksanakan tugas pertimbangan pendahuluan di pihak rakyat; kalau tidak, rakyat tidak akan mampu menjalankan pekerjaan mereka sehari-hari. Tetapi jika badan tersebut kecil jumlahnya, ia menjadi lembaga oligarkis; majelis persiapan pasti sedikit jumlahnya, dan oleh karena itu pasti bersifat oligarkis. Dimana kedua jenis jabatan itu ditemukan, majelis persiapan adalah pengawas para majelis, mereka adalah unsur oligarkis,

---

<sup>98</sup> Aristoteles, *Politik*,...hlm. 210.

dan majelis itu bersifat demokratis. Tetapi bahkan kewenangan majelis itu pun ditumbangkan di dalam demokrasi dan bentuk demokrasi yang ekstrem, dimana rakyat sendiri bersidang untuk menjalankan seluruh urusan negara itu. Hal ini biasanya terjadi ketika ada upah yang tinggi untuk orang yang menghadiri dewan kemudian rakyat mempunyai waktu luang untuk mengadakan pertemuan-pertemuan yang sering memutuskan sendiri semua persoalan-persoalan yang mereka hadapi.

Para pejabat yang memelihara ketertiban di kalangan wanita dan anak-anak, dan pejabat-pejabat lain yang bertugas melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang sama, berwatak aristokratik, tidak demokratis (bagaimana mungkin orang dapat mencegah para istri orang miskin untuk bepergian?); mereka juga tidak oligarkis, karena istri orang yang menjalankan oligarki itu hidup dalam kemewahan.<sup>99</sup> Untuk saat ini sudah cukup untuk membicarakan masalah-masalah ini, dan sekarang kita harus berusaha memberikan suatu penjelasan yang lengkap mengenai pengangkatan para pejabat publik. Perbedaan yang ada disini dihubungkan dengan tiga faktor, yang dalam gabungannya menghasilkan semua mode yang mungkin. Tiga faktor itu adalah:

1. Orang-orang yang mengangkat.
2. Orang-orang yang dapat dipilih untuk melakukan pengangkatan.
3. Metode pengangkatan.

---

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm. 211.

Masing-masing dari ketiga faktor ini melibatkan dua pilihan. Dengan demikian:

- a. Orang-orang yang melakukan pengangkatan mungkin semua warga negara, atau hanya suatu seksi.
- b. Orang-orang yang dapat dipilih untuk melakukan pengangkatan mungkin semuanya warga negara, atau hanya suatu seksi, suatu seksi yang ditentukan oleh persyaratan harta benda, kelahiran, jasa atau beberapa karakteristik yang sama (di Megara, misalnya, hanya orang yang kembali dari pengasingan bersama-sama dan bertempur bersama-sama melawan rakyat banyak itulah yang dapat dipilih untuk melakukan pengangkatan).
- c. Metode pengangkatan bisa berupa pemilihan, atau bisa juga undian.

Di samping itu, kita juga mempunyai suatu hubungan dengan kedua alternatif itu, dengan hasil bahwa:

- a. Untuk beberapa jabatan, orang-orang yang mengangkat bisa jadi seluruhnya warga negara, dan untuk beberapa lain hanya suatu seksi.
- b. Untuk beberapa jabatan, orang-orang yang dapat dipilih bisa jadi semuanya warga negara, dan bagi jabatan lain hanya suatu seksi.<sup>100</sup>
- c. Untuk beberapa jabatan, metode pengangkatan bisa jadi metode pemilihan, dan untuk jabatan-jabatan lain mungkin dipilih lewat undian.

---

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 211-212.

Empat cara itu mungkin dijalankan dalam menangani masing-masing pilihan alternatif (berdasarkan alternatif yang terdapat pada semua warga negara yang mengangkat):

- a. Semua orang dapat mengangkat dari semua orang melalui pemilihan.
- b. Semua orang dapat mengangkat dari semua orang melalui undian.
- c. Semua orang dapat mengangkat dari suatu seksi melalui pemilihan.
- d. Semua orang dapat mengangkat dari suatu seksi melalui undian.

Demikian pula jika suatu seksi warga negara mengangkat:

- a. Mereka dapat mengangkat semua orang melalui pemilihan.
- b. Mereka dapat mengangkat semua orang melalui undian.
- c. Mereka dapat mengangkat dari suatu seksi melalui pemilihan.
- d. Mereka dapat mengangkat dari suatu seksi melalui undian.

Jika mereka mengangkat dari semua orang, mereka dapat melakukannya secara berturut-turut dari seksi-seksi, seperti: suku-suku, divisi-divisi kota, dan dari klan-klan, sampai pada akhirnya semua tercakup, atau secara terus-menerus dari semua orang, pengangkatan jabatan-jabatan tertentu dengan menggunakan salah satu cara ini dan pengangkatan jabatan-jabatan lain dengan menggunakan cara lain. Dengan ini saya bermaksud bahwa mereka dapat mengangkat untuk beberapa jabatan “dari semua orang melalui pemilihan” dan untuk jabatan-

jabatan lain “dari semua orang melalui undian”. Dengan demikian, seluruhnya ada dua belas cara jika kita menghilangkan dua tambahan lainnya.<sup>101</sup>

Dari metode-metode membuat pengangkatan ini, dua metode bersifat demokratik:

- a. Semua orang mengangkat dari semua orang melalui pemilihan atau undian.
- b. Semua orang mengangkat dan semua orang baik melalui pemilihan maupun undian, menggunakan metode tertentu untuk beberapa jabatan dan metode lain untuk jabatan lainnya.

Suatu metode yang khas pada pemerintahan konstitusional (*polity*) ialah: Semua orang mengangkat tetapi bukan pada waktu yang sama. Mereka juga membuat pengangkatan dari semua orang dengan menggunakan pemilihan, undian atau kedua metode ini, atau mereka dapat mengangkat dari semua untuk beberapa jabatan, tetapi mengangkat dari suatu seksi untuk jabatan-jabatan lainnya. Dengan “menggunakan kedua metode ini” yang saya maksud ialah untuk jabatan tertentu, diangkat melalui undian dan jabatan-jabatan lain melalui pemilihan.

Suatu susunan yang cocok dengan oligarki ialah: Suatu seksi mengangkat dari suatu seksi lewat pemilihan, atau undian (tidak masalah bahwa hal ini tidak benar-benar terjadi), atau campuran dari keduanya kemudian suatu susunan yang cocok dengan suatu aristokrasi ialah: Suatu seksi mengangkat dari semua orang, atau semua orang mengangkat dari suatu seksi, melalui metode pemilihan.

---

<sup>101</sup> Aristoteles, *Politik*,...hlm. 212-213.

Demikianlah sejumlah metode yang dapat digunakan sehubungan dengan pengangkatan jabatan-jabatan, dan demikianlah penyalurannya di antara bentuk konstitusi yang berbeda-beda. Sewaktu kita mempertimbangkan jenis-jenis jabatan dan fungsi-fungsinya yang berbeda maka akan menjadi jelas, metode mana yang cocok untuk masing-masing jabatan dan bagaimana pengangkatan harus dilakukan. Yang saya maksud dengan fungsi suatu jabatan ialah fungsi-fungsi sejenis kendali terhadap pajak atau kendali terhadap pasukan pertahanan. Fungsi-fungsi jabatan jenisnya berbeda-beda, misalnya: di antara fungsi seorang jenderal dan fungsi seorang pejabat yang melaksanakan pengawasan terhadap kontrak-kontrak yang dibuat di pasar.<sup>102</sup>

Mengenai tiga unsur di dalam konstitusi, hanya unsur yudisial saja yang tersisa untuk dipertimbangkan. Kita harus mengikuti rencana yang sama dalam menentukan bentuk-bentuk yang berbeda mana yang mungkin diambilnya. Cara-cara yang di dalamnya kantor pengadilan berbeda ialah:

- a. Dalam keanggotaannya (Apakah pengadilan dibentuk dari semua warga negara atau dari suatu seksi).
- b. Di dalam persoalan-persoalan yang ditangani (Berapa banyak jenis pengadilan yang harus ada).
- c. Dalam cara pengangkatan anggota-anggotanya (Apakah pengangkatan itu harus melalui pemilihan atau undian).

---

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 213-214.

Pertama-tama, kita harus menentukan berapa banyak jenis pengadilan yang ada. Dapat dikatakan ada delapan jenis, yaitu:

- a. Pengadilan untuk peninjauan perilaku pejabat publik.
- b. Pengadilan berkaitan dengan pelanggaran terhadap segala hal yang berhubungan dengan kepentingan umum.
- c. Pengadilan untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan konstitusi.
- d. Pengadilan (Ruang lingkupnya mencakup baik para pejabat maupun pribadi-pribadi) untuk kasus-kasus perselisihan di seputar jumlah denda.
- e. Pengadilan untuk kontrak-kontrak di antara pihak swasta perorangan, yang melibatkan jumlah yang besar.
- f. Pengadilan yang mengurus kasus-kasus yang berhubungan dengan pembunuhan.
- g. Pengadilan yang mengurus kasus-kasus yang berhubungan dengan orang asing.

Harus dicatat bahwa pengadilan yang berhubungan dengan pembunuhan mempunyai sejumlah divisi yang dapat digabungkan dibawah satu kelompok hakim atau dirundingkan oleh kelompok hakim yang berbeda-beda, yaitu:

- a. Divisi yang berkaitan dengan pembunuhan berencana.
- b. Divisi yang berkaitan dengan pembunuhan yang tidak disengaja.
- c. Divisi yang berkaitan dengan pembunuhan dimana tindakan itu diakui, tetapi pembedanya dibantah.

- d. Divisi yang berkaitan tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap orang-orang yang dulunya telah dibuang karena membunuh secara tidak disengaja, setelah mereka kembali, contoh: pengadilan di Athena yang dikenal sebagai “ Pengadilan di Phreatto”, tetapi kasus-kasus dari jenis ini selalu jarang, bahkan di kota-kota besar. Pengadilan untuk perkara-perkara orang asing mempunyai dua divisi, satu untuk perkara di antara orang asing dengan orang asing dan lainnya untuk perkara di antara orang asing dengan warga negara.<sup>103</sup>

## **K. Revolusi**

### **1. Motivasi yang Menyebabkan Timbulnya Revolusi**

Menjaga dan memelihara eksistensi negara agar tetap bertahan hidup, bukanlah suatu hal yang mudah. Negara senantiasa dihadapkan dengan berbagai ancaman yang membahayakan eksistensinya, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Salah satu ancaman bahaya yang mendapat perhatian khusus dalam filsafat politik Aristoteles: *revolusi*. Revolusi politik yang sering terjadi dan sangat ditakuti ialah suatu bentuk revolusi yang disertai dengan tindakan kekerasan, kejam, penuh tipu daya dan tidak berperikemanusiaan. Namun pada dasarnya, semua bentuk revolusi itu mengandung bahaya yang mengancam eksistensi negara, oleh karena itu, menurut Aristoteles, hal ini harus dicegah. Untuk dapat mencegah timbulnya revolusi, lebih dahulu perlu diketahui apa yang menjadi motivasi dari orang-orang yang menyebabkan timbulnya revolusi dan apa penyebab timbulnya revolusi itu.

---

<sup>103</sup> Aristoteles, *Politik*,...hlm. 215-216.

Menurut Aristoteles, ada dua motivasi dasar yang mendorong dan merangsang manusia untuk mengobarkan api revolusi, yaitu: *keuntungan* dan *kehormatan*. Tidak seorangpun yang hidup di dunia ini yang merindukan kerugian bagi dirinya. Manusia akan selalu berupaya menghindari hal-hal yang merugikan dirinya, sebaliknya ia akan senantiasa berupaya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri. Ia akan selalu mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan itu. Manusia senantiasa mendambakan keuntungan dalam segala hal bagi dirinya. Bila benteng keadaban dan standar moralitas manusia telah hancur maka nafsu untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri akan merayu dia untuk berani menempuh segala jalan dan cara, bahkan yang terkotor sekalipun, demi pemuasan nafsunya.<sup>104</sup>

Manusia juga dikenal sebagai makhluk yang senantiasa mengejar kehormatan bagi dirinya. Tidak seorangpun yang sudi direndahkan, apalagi dihina. Tidak seorangpun yang akan membiarkan dirinya diremehkan dan dianggap tidak berharga oleh orang lain. Semua manusia memiliki nafsu dan keinginan yang kuat untuk dihargai, dihormati, dan dimuliakan, itulah sebabnya manusia akan senantiasa berupaya untuk meraih penghargaan, kehormatan, dan kemuliaan dalam segala hal dan dalam setiap kemungkinan dan kesempatan yang ada. Apabila benteng keadaban dan standar moralitas telah hancur, maka nafsu untuk meraih penghargaan, kehormatan dan kemuliaan itu akan merayu dia untuk

---

<sup>104</sup> J.H Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 121-122.

menempuh segala jalan dan cara demi pemuasan nafsunya itu, bahkan jalan dan cara yang paling tidak terpuji sekalipun, termasuk revolusi.

Jadi, nafsu untuk meraih *keuntungan* dan *kehormatan*, itulah dua hal yang menurut Aristoteles, menjadi motivasi dasar yang menyebabkan timbulnya revolusi. Dua hal itu pulalah yang menjadi landasan dan dasar dari sebab-sebab timbulnya revolusi itu.

## **2. Sebab-sebab Timbulnya Revolusi**

Agar terapi yang diberikan benar-benar tepat, maka seorang dokter harus sanggup membuat diagnosa yang teliti, seksama dan cermat. Hanya lewat diagnosa yang akurat, dokter dapat menentukan terapi yang benar-benar tepat. Pola kerja itulah yang digunakan Aristoteles untuk menanggulangi bahaya revolusi yang mengancam eksistensi negara idamannya tersebut.<sup>105</sup> Sesudah ia menemukan motivasi yang mendorong orang-orang untuk mengobarkan api revolusi yang sanggup menghancurkan negara, maka Aristoteles lalu menganalisa sebab-sebab timbulnya revolusi itu.

Menurut Aristoteles, ada tiga faktor yang menyebabkan timbulnya revolusi:

- a. Kondisi manusia yang menyebabkan revolusi itu.
- b. Keinginan dan impian yang hendak diraih.
- c. Kondisi politik yang tidak sehat.

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 122-123.

Yang dimaksud dengan kondisi manusia yang menyebabkan revolusi itu lebih tertuju pada kondisi psikologis dan kondisi sosial. Kondisi itu disebut Aristoteles sebagai kondisi dasar yang merupakan *ketidakpuasan terhadap ketidaksamarataan*. Hal itu muncul dari alam fikiran demokratis yang menuntut kesamaan dan kesamarataan dalam segala hal. Semua orang berhak memperoleh keuntungan, kehormatan serta penghargaan yang sama. Kesamaan dan kehormatan itu dalam alam fikiran demokratis adalah sama dengan keadilan. Tidak adanya kesamaan dan kesamarataan itu berarti juga tidak adanya keadilan di dalam negara. Oleh sebab itu, apabila ketidaksamarataan telah menampakkan diri dalam kehidupan negara maka terciptalah suatu kondisi sangat rawan yang mudah mengakibatkan timbulnya revolusi. Mengenai keinginan dan impian yang hendak diraih, sesungguhnya adalah sesuatu yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, yang merupakan penyebab utama bagi pecahnya revolusi. Penyebab utama itu tidak lain dari apa yang sebenarnya merupakan motivasi dari orang-orang yang menyebabkan timbulnya revolusi itu, yakni *keuntungan* dan *penghargaan*.<sup>106</sup>

Adapun kondisi politik tidak sehat yang merupakan asal mula dan penyebab timbulnya revolusi ialah sebelas hal yang menyebabkan manusia tidak puas dan melakukan pemberontakan, yaitu:

1. Keuntungan (*profit*).
2. Penghargaan atau kehormatan (*honour*).
3. Perlakuan yang tidak pantas atau perlakuan yang buruk (*ill-treatment*).

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 123-124.

4. Ketakutan (*fear*).
5. Hal yang berlebihan (*preponderance*).
6. Sikap memandang rendah atau menghina (*contemptuous attitudes*).
7. Ketidakseimbangan (*disproportionate*).
8. Pengumpulan atau pemungutan suara (*soliciting of votes*).
9. Kekurangwaspadaan (*lack of vigilance*).
10. Perubahan-perubahan yang tidak dapat difahami (*imperceptible changes*).
11. Ketidakcocokan (*dissimilarity*).

### **3. Mencegah Timbulnya Revolusi**

Menurut Aristoteles, ada tiga hal yang sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya revolusi. Ketiga hal tersebut ialah:

- a. Pendidikan.
- b. Rasa hormat/ tunduk kepada hukum.
- c. Keadilan di dalam hukum serta administrasi.

Bagi suatu pemerintahan yang benar-benar ingin menghindari ancaman bahaya revolusi, selain pendidikan, Aristoteles mengatakan bahwa sangat perlu ditanamkan rasa hormat dan kemauan untuk tunduk kepada hukum. Pemerintah harus berupaya untuk menimbulkan dan mengobarkan semangat untuk mentaati hukum dan undang-undang. Semangat untuk mentaati hukum dan undang-undang itu harus nyata terlihat bukan hanya dalam menghadapi perkara yang besar, tetapi juga harus nyata terlihat di dalam hal-hal yang dianggap kecil dan yang sering dianggap sepele. Apabila seluruh warga negara memiliki semangat tinggi untuk

mentaati hukum dan undang-undang, maka peluang bagi timbulnya suatu revolusi politik akan diperkecil bahkan mungkin dapat dicegah sama sekali.<sup>107</sup>

## **N. Metode-metode Mengkonstruksi Demokrasi dan Oligarki Dengan Pandangan Khusus Pada Stabilitasnya yang Lebih Besar**

### **1. Konstruksi Demokrasi**

Kita telah mempertimbangkan berbagai jenis pemikiran dan kekuatan-kekuatan tertinggi di negara-negara, berbagai tata aturan sidang pengadilan dan jabatan-jabatan negara, serta adaptasinya pada berbagai bentuk pemerintahan. Kita juga telah membahas kehancuran dan pelestarian konstitusi, serta bagaimana dan apa sebab-sebab kemunculannya. Demokrasi dan bentuk-bentuk pemerintahan lainnya itu sangat beragam dan akan baik sekali jika kita berikan kepada mereka beberapa model organisasi yang sesuai dan bermanfaat bagi mereka guna menambahkan yang telah ada kemudian kita perlu mempertimbangkan berbagai kombinasi dari model-model ini, karena kombinasi-kombinasi tersebut membuat konstitusi-konstitusi yang ada saling tumpang tindih, sehingga aristokrasi memiliki karakter oligarki dan pemerintahan konstitusional cenderung menjadi demokrasi.

Telah ditunjukkan bagaimana bentuk demokrasi yang sesuai dengan kota-kota tertentu, oligarki yang sesuai untuk masyarakat tertentu, dan bentuk-bentuk pemerintahan lainnya yang sesuai dengan rakyat kemudian kita tidak hanya

---

<sup>107</sup> J.H Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*,...hlm. 124.

menunjukkan bentuk-bentuk pemerintahan ini yang terbaik bagi setiap negara, tetapi juga secara gamblang menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk pemerintahan tersebut ditetapkan.<sup>108</sup>

Pertama adalah tentang demokrasi yang juga menjelaskan bentuk terbalik dari bentuk pemerintahan yang biasa disebut dengan oligarki. Untuk ini kita perlu memastikan semua elemen dan karakteristik demokrasi, karena dari berbagai kombinasinya, berbagai jenis pemerintahan demokrasi bermunculan. Ada beberapa perbedaan di antara setiap jenis tersebut yang disebabkan dua alasan:

1. Perbedaan dalam populasi karena elemen yang paling dikenal adalah petani, mekanik, dan buruh. Jika yang pertama ditambahkan pada yang kedua, atau yang ketiga pada dua yang lain, bukan hanya demokrasi yang menjadi menjadi lebih baik atau lebih buruk, tetapi juga sifatnya sendiri yang berubah.
2. Berbagai properti dan karakteristik dari demokrasi, ketika dikombinasikan secara beragam, akan terlihat adanya perubahan. Satu demokrasi kurang memiliki karakter, demokrasi berikutnya memiliki karakter lebih, dan demokrasi yang lain bahkan memiliki semua karakter yang disebutkan. Ada manfaat yang dapat dipetik dengan mengetahui semuanya, baik orang yang ingin menetapkan beberapa bentuk baru dari demokrasi maupun hanya memodifikasi demokrasi yang telah ada. Para pendiri negara mencoba menyatukan elemen-elemen tersebut yang sesuai dengan semangat beberapa konstitusi. Namun, ini sebenarnya satu kesalahan yang mereka perbuat, seperti

---

<sup>108</sup> Aristoteles, *Politik (La Politica)*, ter. Syamsur Irawan Kharie (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 289.

yang telah disebutkan ketika membahas tentang kehancuran atau kelestarian negara. Kita perlu menyetengahkan berbagai prinsip, karakteristik, dan tujuan negara.

Basis dari sebuah negara demokratis adalah kebebasan yang menurut pendapat umum hanya dapat dinikmati oleh negara tersebut. Ini yang mereka sebut dengan tujuan agung dari setiap demokrasi. Satu prinsip kebebasan adalah semua orang dapat memerintah dan dapat diperintah pada saatnya dan sesungguhnya keadilan demokratis adalah aplikasi numerik, bukan kesetaraan yang proporsional. Dari sini, mayoritas adalah yang tertinggi dan apapun yang diputuskan secara mayoritas harus menjadi putusan akhir dan bersifat adil.<sup>109</sup> Setiap warga negara harus memiliki kesamaan sehingga dalam sebuah demokrasi golongan miskin lebih memiliki kekuasaan daripada golongan kaya karena jumlah mereka lebih besar dan keinginan mayoritas adalah yang tertinggi. Ini adalah satu catatan dari kebebasan yang diakui oleh semua kalangan demokrat sebagai prinsip negaranya. Yang lainnya adalah seseorang harus menjalankan hidupnya seperti yang disukai. Mereka mengatakan bahwa ini adalah hak istimewa manusia karena tidak menjalani hidup sebagaimana seorang budak. Ini merupakan karakteristik kedua dari demokrasi yang memunculkan pernyataan bahwa tidak seorangpun dapat memerintah orang lain. Jika memungkinkan, atau jika hal ini tidak mungkin, memerintah dan diperintah dapat dilakukan secara bergilir. Dengan demikian, hal itu memiliki kontribusi pada kebebasan berdasarkan kesamaan.

---

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 290-291.

Perihal dan prinsip tersebut telah ada sejak kita memulai dengan karakteristik demokrasi bahwa pemilihan pejabat dilakukan dengan melibatkan semua orang, dan semua orang dapat memimpin yang lain ketika mendapat giliran, penunjukan semua jabatan mensyaratkan pengalaman dan keterampilan, serta harus dilakukan melalui secara kertas bahwa untuk jabatan tidak diisyaratkan adanya kualifikasi harta atau dikenakan hanya untuk posisi yang rendah. Seseorang hanya diperbolehkan memegang jabatan yang sama sebanyak dua kali, atau hanya untuk kasus-kasus tertentu pada jabatan militer.<sup>110</sup> Masa jabatan bagi setiap posisi jabatan harus singkat dan setiap orang berhak menjalankan fungsi penilaian dalam tataran hukum atau para hakim harus dipilih dari semua orang yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam segala hal, berdasarkan kebanyakan kasus penting lainnya, seperti pemeriksaan pertanggungjawaban, konstitusi, dan kontrak-kontrak individual, bahwa sidang harus merupakan pembuat keputusan tertinggi terhadap segala jenis kasus atau hanya untuk kasus-kasus yang penting dan majelis hakim hanya terdiri dari beberapa pejabat.

Karakteristik berikutnya dari demokrasi adalah pembayaran atas pelayanan, seperti: sidang umum, sidang pengadilan, magistrasi, termasuk setiap orang yang menerima gaji ketika harus dibayarkan atau tidak sama sekali, maka pembayaran tersebut diberikan kepada sidang-sidang pengadilan, sidang-sidang umum, dewan dan magistrasi, atau setidaknya kepada mereka yang terpaksa makan bersama. Jika oligarki dicirikan dengan kelahiran, kekayaan, dan pendidikan, catatan tentang demokrasi merefleksikan kondisi yang sebaliknya, yaitu kelahiran (dari kelas yang

---

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm. 291-292.

lebih rendah), kemiskinan, dan pengangguran, catatan lain adalah tidak ada lembaga magistrat yang abadi, tetapi jika ada lembaga yang berhasil melalui transisi perubahan konstitusi maka harus dilucuti dari kekuasaannya, dan penanggung jawabnya harus dipilih melalui secarik kertas, tidak lagi melalui pemungutan suara. Ini semua adalah aspek yang umum bagi semua demokrasi, tetapi demokrasi dan *demos* dalam bentuk aslinya didasarkan pada prinsip keadilan, yakni semua orang harus diperhitungkan secara sederajat yang berarti bahwa yang miskin tidak lebih berperan daripada yang kaya dalam pemerintahan dan tidak hanya satu-satunya penguasa, tetapi semuanya akan mendapat giliran memerintah sesuai dengan jumlahnya. Dengan demikian, orang berpikir bahwa mereka harus mengamankan kesetaraan dan kebebasan dalam negara mereka.

Kemudian muncullah pertanyaan, bagaimana kesetaraan itu bisa dicapai? Apakah kita akan mengenakan kepada seribu orang miskin, kualifikasi kekayaan yang berlaku bagi lima ratus orang kaya? Apakah kita akan memberikan seribu kekuasaan yang setara dengan lima ratus?<sup>111</sup> Atau, jika ini bukan cara yang benar, haruskah kita mempertahankan rasio yang sama, yakni mengambil jumlah yang sama dari masing-masing dan memberikan mereka kendali atas pemilihan dan pengadilan? Menurut catatan demokratis, yang mana yang lebih adil dari konstitusi, ini atau yang didasarkan hanya pada jumlah saja? Kaum demokrat mengatakan bahwa keadilan adalah ketika mayoritas setuju kemudian kaum oligarkis mengatakan kelas yang lebih kaya. Menurut pendapat mereka, keputusan harus diberikan sesuai dengan jumlah harta kekayaan. Dalam kedua prinsip

---

<sup>111</sup> Aristoteles, *Politik (La Politica)*,...hlm. 292-293.

tersebut terkandung ketidaksetaraan dan ketidakadilan karena jika keadilan adalah kemauan dari sebagian kecil orang dan seseorang yang memiliki harta kekayaan yang lebih dari orang lain itu menurut prinsip oligarkis memiliki kekuasaan tunggal. Namun, ini akan menjadi tirani atau jika keadilan adalah kemauan dari mayoritas, berarti mereka akan dengan semena-mena menyita harta kekayaan minoritas yang kaya. Agar prinsip kesetaraan disepakati oleh keduanya, kita perlu memahami ide sesungguhnya dari masing-masing keadilan.

Mereka sepakat mengatakan bahwa apapun yang diputuskan oleh mayoritas rakyat harus dianggap sebagai ketetapan hukum. Setuju, tetapi tidak tanpa persyaratan, karena ada dua kelas ketika sebuah negara tersusun, yaitu yang miskin dan kaya, yang dianggap sebagai hukum, dan keduanya atau bagian yang lebih besar dari keduanya setuju dan tidak sepakat, karena disetujui oleh jumlah yang lebih besar dan mereka yang memiliki kualifikasi yang lebih tinggi. Misalnya: seandainya terdapat sepuluh orang kaya dan dua puluh orang miskin, serta beberapa ketentuan yang diputuskan oleh enam orang kaya dan tidak disetujui oleh lima belas orang miskin, dan sisa empat orang yang kaya bergabung dengan pihak orang miskin, sedangkan sisa lima orang miskin bersama sisa orang kaya. Dalam kasus tersebut keinginan mereka yang berkualifikasi lebih besar, ketika keduanya digabungkan itu tetap ada. Jika perbandingan mereka sama, tidak ada masalah seperti saat ini jika badan musyawarah atau sidang pengadilan

dipisahkan, ketika upaya pemilihan harus melalui secarik kertas atau upaya serupa yang diperlukan.<sup>112</sup>

Dari keempat jenis demokrasi, seperti yang telah disebutkan dalam diskusi sebelumnya, yang terbaik adalah yang pertama dari urutan tersebut. Urutan pertama tersebut juga yang tertua dari semuanya. Ini sesuai dengan klasifikasi alami para penghuninya. Isi terbaik dari demokrasi adalah masyarakat pertanian. Tidak ada kesulitan dalam membentuk demokrasi ketika sebagian masyarakatnya hidup dari pertanian atau memelihara ternak. Karena menjadi miskin, mereka tidak mempunyai waktu untuk bersenang-senang sehingga tidak bisa sering menghadiri musyawarah dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, maka mereka harus bekerja keras dan tidak dapat meminta bantuan dari yang lain. Sesungguhnya mereka merasa majikannya lebih baik daripada perhatian yang diberikan pemerintah. Buktinya adalah para penguasa tirani zaman dahulu lebih mereka terima sebagaimana oligarki pada waktu itu, jika mereka diizinkan bekerja dan tidak dirampas hak miliknya. Sebagian di antara mereka cepat menjadi kaya daripada yang lain. Terlebih lagi, mereka memiliki kekuasaan untuk memilih anggota majelis hakim dan berhak meminta pertanggungjawaban anggota majelis tersebut. Dalam beberapa jenis demokrasi, tidak semua mendapatkan kesempatan untuk menduduki jabatan di pemerintahan, kecuali melalui para perwakilannya yang dipilih secara berkala dari seluruh rakyat, seperti yang terjadi di Mantinea. Namun, jika mereka mempunyai kekuasaan untuk memutuskan, sebagian besar

---

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm. 294-295.

rakyat akan mendukung. Bahkan, bentuk pemerintahan ini dianggap sebagai demokrasi, seperti di Mantinea.

Oleh karena itu, keduanya diperlukan dan merupakan kebiasaan dalam jenis demokrasi yang pertama disebutkan, yaitu: seluruh rakyat harus memberikan suaranya dan melakukan uji kelayakan, serta duduk dalam sidang-sidang pengadilan.<sup>113</sup> Namun, jabatan-jabatan penting lainnya harus diisi melalui pemilihan umum dan dari mereka yang memiliki kualifikasi tertinggi. Semakin besar persyaratannya, maka semakin besar kualifikasi yang ditetapkan, atau jika ada posisi jabatan yang dipersyaratkan tidak tercantum dalam kualifikasi, berarti mereka yang bisa menunjukkan kemampuan khususlah yang harus dipilih. Dibawah bentuk pemerintahan seperti itu rakyat merasa yakin akan diperintah dengan baik (karena jabatan penting akan selalu dipegang oleh mereka yang terbaik. Rakyat sangat senang memilih mereka, bukan karena kecemburuan terhadap prestasi mereka). Mereka yang berprestasi dan terkenal akan sangat senang, karena tidak akan diperintah oleh orang-orang yang berstatus lebih rendah daripada mereka dan mereka yang terpilih akan menjalankan pemerintahan dengan seadil-adilnya karena yang lain dapat menuntut pertanggungjawabannya. Setiap orang bertanggung jawab terhadap yang lain atau tidak seorangpun dapat bertindak semaunya karena ketika kebebasan absolut diperbolehkan, tidak akan ada aturan yang dapat mencegah kejahatan dalam diri manusia untuk tumbuh berkembang. Namun, prinsip tanggung jawab itu memastikan yang terbaik bagi negara. Orang yang tepat memerintah itu dibatasi dari kemungkinan berbuat kesalahan dan rakyat

---

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm. 295-296.

memberikan mandatnya. Jelaslah bahwa ini merupakan jenis demokrasi yang terbaik. Mengapa? Karena orang dipilih dari kelas tertentu. Beberapa aturan hukum tua dari kebanyakan negara itu sangat berguna, khususnya dalam menjadikan rakyat sebagai petani.

Aturan hukum tersebut membatasi kepemilikan lahan kepada seseorang yang tidak melebihi jumlah tertentu atau jika seseorang memiliki lebih dari jumlah yang ditentukan dan keberadaan lahan-lahannya harus terletak jauh dari kota atau *acropolis*. Dahulu di banyak negara terdapat hukum yang melarang seseorang untuk menjual tanah miliknya. Ada aturan hukum serupa yang berlaku bagi Oxylyus, yang dimaksudkan agar ada proporsi tertentu kepemilikan lahan oleh seseorang sehingga dia tidak bisa meminjam uang.<sup>114</sup> Aturan hukum yang digunakan untuk memperkecil kemungkinan timbulnya perbuatan jahat seseorang adalah aturan hukum yang dimiliki oleh Bangsa Aphytaea, yang seluruh penduduknya adalah petani, meskipun jumlah mereka banyak dan tidak memiliki lahan yang banyak. Properti mereka tercatat dalam sensus meskipun tidak seluruhnya atau hanya sebagian kecil, dan bahkan orang miskin pun mampu memiliki lebih dari jumlah tersebut.

Terbaik berikutnya setelah pertanian adalah masyarakat pastoral yang hidup dari ternak mereka. Mereka terlatih untuk berperang, memiliki postur tubuh yang kuat, dan mampu hidup di luar rumah. Masyarakat yang hidup dalam alam demokrasi jauh lebih inferior daripada mereka. Tidak ada penilaian keunggulan

---

<sup>114</sup> Aristoteles, *Politik (La Politica)*, ter. Syamsur Irawan Kharie (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 296-297.

moralitas dalam pekerjaan mereka, baik mereka mekanik, pedagang, maupun buruh. Di samping itu, masyarakat dari kelas ini siap menghadiri musyawarah karena mereka terus-menerus bergerak di dalam kota dan di *agora*, sedangkan para peternak tersebar dimana-mana dan tidak merasakan pentingnya berkumpul untuk sebuah musyawarah. Saat wilayah kekuasaan kebetulan meluas menjauh dari kota, tidak akan ada kesulitan dalam membentuk pemerintahan demokrasi atau konstitusional yang sempurna. Masyarakat diharuskan tinggal di wilayah pedesaan. Bahkan, jika ada sebuah komunitas dalam kota mereka, para warga tidak diharuskan menghadirinya ketika mereka memang tidak sanggup menghadirinya. Telah dijelaskan bagaimana bentuk demokrasi yang pertama dan terbaik ditetapkan. Jelaslah bahwa yang lain atau inferior akan tersingkir dari urutannya dan kelompok masyarakat yang tidak masuk dalam hitungan akan menempati urutan terendah di setiap tahapannya.

Bentuk terakhir dari demokrasi adalah yang tidak dapat dilahirkan oleh negara apapun, dan tidak akan bertahan lama kecuali diatur dengan baik oleh aturan hukum dan tata kebiasaan. Sebab-sebab umum yang cenderung menghancurkan jenis demokrasi ini atau bentuk pemerintahan yang lain telah dibahas secara seksama. Dalam rangka menetapkan sebuah demokrasi seperti itu sekaligus memperkuat kapasitas masyarakatnya, para pemimpinnya terbiasa memasukkan sebanyak mungkin orang yang mereka bisa dan menjadikan mereka sebagai warga masyarakat, baik yang berstatus legal maupun ilegal, termasuk mereka yang salah satu orangtuanya berstatus warga negara. Tidak ada satupun dari mereka menyenangkan bagi bentuk demokrasi tersebut. Ini adalah cara ketika

para pemimpin politik nakal berkiprah. Yang benar adalah tidak menambahkan jumlah anggota masyarakat yang melampaui jumlah bangsawan dan kelas menengah. Jika jumlah anggota masyarakat melampaui jumlah ideal, konstitusi menjadi tidak beraturan dan para bangsawan menjadi tidak tenang dalam demokrasi tersebut, sebagaimana kebangkitan di Cyrene. Aturan-aturan sebagaimana disetujui oleh Cleisthenes ketika dia ingin meningkatkan kekuasaan demokrasi di Athena, atau seperti yang digunakan oleh para pendiri pemerintahan di Cyrene, adalah sangat berguna dalam bentuk demokrasi yang ekstrem. Kelompok suku dan persaudaraan harus dibangun, serta ritual keluarga harus dibatasi dan diubah menjadi hajatan nasional. Secara singkat, setiap usaha harus dimanfaatkan yang akan membaurkan rakyat sekaligus menghapus jejaring hubungan yang lama. Langkah-langkah yang ditempuh oleh para tiran merupakan langkah-langkah demokratis, misalnya: izin melaksanakan perbudakan (yang mungkin dalam derajat tertentu bermanfaat), untuk perempuan dan anak-anak, dan membiarkan setiap orang hidup dengan cara yang disukai. Pemerintahan seperti itu akan mempunyai banyak pendukung karena sebagian rakyat lebih suka dalam ketidakteraturan.

Pembentukan sebuah demokrasi bukan merupakan urusan terpenting bagi para legislator, atau urusan mereka yang berkeinginan membentuk sebuah negara, karena sebuah negara, betapapun buruk pembentukannya, hanya akan berumur satu, dua, atau tiga hari.<sup>115</sup> Kesulitan yang jauh lebih besar adalah bagaimana mempertahankannya. Para legislator harus berupaya menemukan fondasi kuat

---

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm. 299-300.

yang sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana telah dijelaskan mengenai ketahanan dan kerusakan sebuah negara. Para legislator harus berusaha menjaganya dari elemen-elemen yang merusak dan harus menetapkan aturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, yang memuat aturan tentang pelestarian sebuah negara. Dia harus memahami sepenuhnya ukuran-ukuran demokrasi atau oligarki sehingga tidak condong ke arah demokrasi atau oligarki saja, agar menjadikan negara tersebut bertahan lebih lama. Para pemimpin politik yang nakal saat ini sering melakukan tindakan konfiskasi terhadap harta kekayaan yang semata-mata agar rakyat senang. Namun, mereka menyadari keadaan tersebut harus mencegah kebiasaan yang terjadi dan menetapkan aturan bahwa harta kekayaan yang dikonfiskasi bukan milik umum dan masuk dalam kas negara, tetapi menjadikannya sesuatu yang sakral. Dengan demikian, para pelanggar akan merasa takut karena mereka dapat dijatuhi hukuman dan rakyat tidak mendapatkan apa-apa, sehingga mereka tidak semena-mena dalam menjatuhkan dakwaan kepada tertuduh. Perlu lebih berhati-hati agar pengadilan dilakukan sedikit mungkin dan hukuman berat dapat dijatuhkan kepada mereka yang melakukan dakwaan tanpa dasar, karena ini adalah tindakan mendakwa, bukan anggota kelompok yang difavoritkan, tetapi para bangsawan, meskipun rakyat harus dimasukkan dalam pengaturan konstitusi atau setidaknya tidak menganggap para penguasanya sebagai musuh.<sup>116</sup>

Disebabkan dalam bentuk demokrasi yang terakhir dan terburuk, jumlah warga negaranya sangat banyak dan sangat sulit mengharapkan kesediaan mereka

---

<sup>116</sup> Aristoteles, *Politik (La Politica)*,...hlm. 300-301.

untuk berkumpul guna bermusyawarah, kecuali jika mereka dibayar kemudian harus membayar mereka ketika tidak ada pemasukan yang dapat dipaksakan diterima dari kaum bangsawan (karena uang harus diperoleh dari pajak kekayaan, hasil konfiskasi, serta praktik-praktik korupsi di sidang pengadilan yang dahulu ada, serta saat ini menumbangkan banyak demokrasi). Karena tidak ada pemasukan, pemerintah terpaksa membatasi jumlah pelaksanaan musyawarah dan sidang pengadilan yang seharusnya dihadiri banyak anggota, terpaksa harus dilakukan secara singkat dan dihadiri oleh anggota yang sedikit. Sistem tersebut memiliki dua keuntungan:

1. Yang kaya tidak perlu khawatir untuk mengeluarkan uang meskipun mereka tidak dibayar, sedangkan yang miskin dibayar.
2. Menghasilkan proses peradilan yang lebih baik, karena bagi orang kaya, meskipun tidak ingin berlama-lama absen dari urusan mereka masing-masing itu tidak berkeberatan untuk menghadiri sidang pengadilan selama beberapa hari.

Jika ada pemasukan keuangan bagi negara, para pemimpin politik yang berkuasa tidak diizinkan mendistribusikan kelebihan pemasukan tersebut untuk mereka sendiri. Yang miskin selalu menerima dan terus meminta lebih, bagaikan air yang terus-menerus dikururkan ke dalam ember kayu yang bocor. Meskipun demikian, sahabat sejati rakyat harus mengetahui bahwa mereka mungkin tidak terlalu miskin karena kemiskinan yang ekstrem akan semakin merendahkan karakter demokrasi. Oleh karena itu, perlu diambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kemakmuran yang berkelanjutan sehingga

merupakan keinginan dari semua kelas masyarakat, maka keuntungan dari pajak masyarakat harus diakumulasi dan didistribusikan di antara kaum miskin. Jika memungkinkan, dalam jumlah tertentu mereka membeli lahan kecil atau setidaknya dapat memulai usaha dagang atau peternakan. Jika kemurahan hati ini tidak dapat disalurkan ke semua orang, uang hasil keuntungan tersebut harus didistribusikan secara bergilir menurut golongan atau mekanisme pembagian yang lain dan pada saat yang sama, yang kaya harus membayar ongkos kehadiran orang miskin pada sidang musyawarah tertentu.<sup>117</sup>

## **2. Konstruksi Oligarki**

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, tidak akan ditemui kesulitan dalam melihat apa yang seharusnya menjadi konstitusi dari negara oligarki. Kita hanya perlu mencari alasan dari kemungkinan-kemungkinan yang lain dan membanding-bandingkan setiap bentuk oligarki yang memiliki keterkaitan dengan bentuk demokrasi. Bentuk oligarki pertama dan terbaik adalah serupa dengan pemerintahan konstitusional. Dalam bentuk ini terdapat dua standar kualifikasi, yakni kualifikasi tinggi dan kualifikasi rendah. Yang lebih rendah mengkualifikasikan kelas sosial yang lebih rendah dan yang lebih tinggi bagi kelas sosial yang lebih tinggi. Seseorang yang berhasil mencapai kualifikasi yang dipersyaratkan itu memiliki hak atas kewarganegaraan. Jumlah mereka yang diakui harus sebanyak yang diperlukan dalam memperkuat badan pemerintahan

---

<sup>117</sup> *Ibid*,...hlm. 302-303.

daripada mereka yang tidak diakui, serta warga negara yang baru diakui harus diambil dari kelas masyarakat yang lebih tinggi. Prinsip tersebut menghasilkan bentuk oligarki yang lain hingga pada akhirnya kita dapatkan kelompok yang paling eksklusif dan tirani di antara mereka, yang menjawab ekstremitas demokrasi yang memerlukan kecermatan dalam proporsinya terhadap sifat-sifat buruknya, seperti tubuh yang sehat dan kapal yang lengkap dengan awaknya yang sanggup melalui rintangan dengan selamat. Sementara itu, konstitusi yang buruk dan awak kapal yang tidak terlatih akan hancur, bahkan oleh kesalahan sekecil apapun, demikian pula dengan bentuk pemerintahan yang paling buruk itu memerlukan perhatian yang sangat besar. Demokrasi yang memiliki jumlah populasi yang sangat banyak itu umumnya menjaga kelestarian mereka, karena mempertahankan kondisi sebuah oligarki itu jelas tergantung pada prinsip yang sebaliknya, yaitu: tatanan yang baik.

Ada empat pembagian besar rakyat umum, yaitu: petani, mekanik, pedagang retail, dan buruh. Demikian juga ada empat jenis kekuatan militer, yaitu: kavaleri, infanteri senjata berat, pasukan bersenjata ringan, dan angkatan laut. Ketika negara terbiasa menggunakan kavaleri, sebuah oligarki yang kuat cenderung terbentuk. Keamanan rakyat tergantung pada kekuatan militer jenis ini, dan hanya orang kaya yang dapat memelihara kuda. Bentuk oligarki kedua muncul ketika sebuah negara terbiasa menggunakan kekuatan infanteri bersenjata lengkap. Pelayanan yang lebih baik dalam negeri ini lebih sesuai kepada yang kaya daripada yang miskin. Namun, elemen pasukan bersenjata ringan dan angkatan laut secara keseluruhan menjadikan demokrasi. Dewasa ini, ketika

jumlah mereka banyak, jika ada dua pihak yang saling bertikai, oligarki sering terpuruk oleh mereka yang bertikai. Upaya perbaikan situasi ini dapat ditemukan dalam praktik para jenderal yang mengkombinasikan pasukan bersenjata ringan dengan kavaleri dan pasukan bersenjata berat. Ini adalah cara agar yang miskin mengungguli yang kaya dalam persaingan sipil. Dengan bersenjata ringan, mereka bertempur dengan mudah melawan kavaleri. Pasukan bersenjata berat ketika dipersenjatai dengan senjata ringan bertempur dengan mudah melawan kavaleri dan infanteri bersenjata lengkap.

Sebuah oligarki yang memunculkan kekuatan tersebut dari masyarakat kelas rendah meningkatkan kekuatan yang digunakan untuk melawan dirinya sendiri. Oleh karena itu, karena usia anggota masyarakat beragam, maka sang ayah harus memiliki anak laki-laki. Sewaktu kecil, anak laki-laki diajari kelincahan gerak pasukan bersenjata ringan, dan anak-anak ini ketika telah diberi pangkat, akan menjadi prajurit bersenjata ringan yang sesungguhnya.<sup>118</sup> Oligarki harus mengupayakan rakyat agar bisa mengambil bagian dalam pemerintahan, baik dari mereka yang mempunyai kualifikasi harta kekayaan maupun seperti kasus yang terjadi di Thebes, yaitu: mereka yang *abstain* selama beberapa tahun dari pengabdian, atau seperti di Massalia, yaitu: orang berprestasi yang dipilih karena jabatannya, baik sebelumnya dia adalah warga negara maupun tidak.

Kenyataan bahwa para hakim ketika mulai memegang jabatan harus melakukan pengorbanan atau mendirikan bangunan besar untuk kepentingan rakyat, kemudian rakyat turut serta dalam menikmati hiburan dan menyaksikan

---

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm. 305-306.

seluruh penjuru kota dihiasi bangunan-bangunan dan persembahan kepada dewa sebagai tanda terima kasih mereka yang tidak akan menjadikan sebuah perubahan dalam pemerintahan, dan para bangsawan akan diabadikan dalam bentuk patung keagungan mereka. Meskipun demikian, hal ini hanyalah gaya oligarkis modern kita, yang melambangkan keserakahan ketika mereka diberi kehormatan. Oligarki seperti yang mereka jalani dapat digambarkan sebagai demokrasi kelas rendah.

Tidak ada negara yang dapat berdiri tanpa memiliki jabatan-jabatan penting, dan tidak satupun negara yang dapat dikelola dengan baik tanpa memiliki kewenangan guna menjaga harmonisasi dan ketatalaksanaan yang baik. Di negara-negara kecil, sebaiknya tidak banyak jumlah mereka, tetapi di negara-negara besar jumlah mereka harus banyak sehingga kita harus berhati-hati untuk mempertimbangkan kewenangan mana yang sebaiknya digabungkan dan mana yang sebaiknya dipisahkan. Seorang hakim dipilih dengan tugas memastikan kontrak-kontrak yang berlaku dan memperhatikan tata laksana yang baik. Di setiap negara ada pembeli dan penjual yang akan menyuplai kebutuhan satu dan yang lainnya.<sup>119</sup> Ini merupakan cara yang paling cepat untuk menjadikan negara berswadaya dan memenuhi tujuan mereka yang datang ke dalam suatu negara. Kewenangan hakim yang lain adalah melaksanakan pengawasan, melengkapi bangunan publik dan perorangan, merawat rumah-rumah dan jalan, mencegah kemungkinan terjadinya pertikaian lintas batas, serta hal-hal lainnya. Ini yang sering disebut dengan jabatan penjaga kota yang di dalamnya terdapat banyak departemen yang di kota-kota terpadat penduduknya jabatan tersebut dipegang

---

<sup>119</sup> Aristoteles, *Politik (La Politica)*,...hlm. 306-308.

oleh beberapa orang. Ada juga jabatan lain yang tidak kalah pentingnya, yang terkait dengan persoalan yang sama, tetapi tanpa batas dan sifatnya internal. Hakim yang memegang jabatan ini disebut dengan penjaga negara atau inspektur kehutanan. Selain ketiga jabatan tersebut, terdapat jabatan keempat yang bertugas menerima pungutan pajak, yang berwenang mendistribusikan pendapatan pajak tersebut ke berbagai departemen, ini disebut dengan bendahara. Pejabat yang lain mencatat seluruh kontak perorangan, keputusan-keputusan pengadilan, seluruh tuntutan publik, serta semua laporan awal. Jabatan ini ada kalanya dibagi-bagi lagi ke dalam sub-bagian dengan seorang penanggung jawab yang dipilih untuk memimpin setiap sub-bagian tersebut. Para penanggung jawab tersebut dinamakan juru catat atau juru catat tersumpah, presiden, dan lain sebagainya.

Berikutnya ada jabatan yang tugas dan tanggung jawabnya sangat diperlukan dan sangat sulit, yaitu: menyangkut pelaksanaan hukuman atau memutuskan denda kepada mereka yang terdaftar sebagai pelanggar dan penjaga penjara. Kesulitan dari tugas ini timbul dari adanya kebencian orang banyak terhadap seseorang. Tidak seorangpun yang bersedia melaksanakannya kecuali digaji tinggi dan siapapun yang melaksanakannya tidak akan menerapkan aturan hukum. Meskipun demikian, tugas dan tanggung tersebut diperlukan karena keputusan yudisial tidak akan berguna jika tidak memiliki dampak.<sup>120</sup> Meskipun tidak begitu populer, jabatan ini tidak bisa dipercayakan kepada seseorang, tetapi dibagi-bagikan kepada beberapa pihak yang berasal dari sidang-sidang pengadilan yang berbeda. Upaya yang sama juga diperlukan dalam mendistribusikan kepada

---

<sup>120</sup> *Ibid*, hlm. 308-309.

orang-orang yang berbeda catatan tentang mereka yang terdaftar sebagai yang berutang.

Ini semua adalah pejabat-pejabat yang memiliki peran penting dan harus diberi peringkat. Kemudian, dalam rangka menindaklanjutinya itu diperlukan pengalaman dan kepercayaan. Para pejabat yang dimaksud adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap keamanan kota dan fungsi-fungsi militer. Tidak hanya dalam masa perang, tetapi juga pada masa damai. Tugas mereka adalah menjaga dan mempertahankan dinding-dinding pertahanan dan pintu-pintu gerbang, termasuk mengumpulkan dan mengamankan warga kota. Di beberapa negara, pejabat-pejabat seperti ini cukup banyak dan di negara lain hanya sedikit, sedangkan negara-negara kecil umumnya hanya memiliki satu pejabat. Pejabat-pejabat yang dimaksud disebut dengan jenderal atau komandan. Jika sebuah negara memiliki kavaleri, pasukan bersenjata ringan, pasukan panah, atau sebuah kekuatan laut, seringkali terjadi bahwa masing-masing dari departemen tersebut memiliki pejabat yang terpisah, yang disebut dengan laksamana atau jenderal kavaleri atau pasukan bersenjata ringan. Selain itu, ada pejabat dibawahnya yang disebut dengan kapten angkatan laut, serta kapten pasukan bersenjata ringan dan berkuda. Semua ini termasuk dalam departemen perang (pertahanan).

Disebabkan banyaknya jumlah jabatan tersebut, walaupun tidak seluruhnya menangani keuangan rakyat, harus ada jabatan lain yang hanya memeriksa dan mengaudit laporannya. Pejabat-pejabat yang dimaksud itu disebut dengan sebutan yang berbeda-beda, seperti: *scrutineer*, auditor, akuntan, atau pengawas. Selain jabatan-jabatan ini terdapat pula jabatan lain yang lebih tinggi,

posisi tersebut memegang tanggung jawab sebagai pelaksana sidang musyawarah sebagaimana halnya dalam demokrasi. Harus ada badan yang berwenang memanggil semua penguasa tinggi negara. Di beberapa tempat, mereka disebut dengan *probuli* karena mereka memegang hak untuk memutuskan, tetapi dalam demokrasi lebih sering disebut dengan *councilors*. Ini semua adalah jabatan utama dalam politik.

Kumpulan jabatan lain adalah yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan hal-hal terkait lainnya. Yang terkait dengan jabatan-jabatan ini adalah pejabat yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam masalah pengorbanan publik, kecuali hukum menetapkan pendeta sebagai penanggung jawabnya. Kadang-kadang mereka disebut dengan *archons* atau raja dan kadang-kadang disebut dengan *prytanes*. Semua ini adalah jabatan yang diperlukan, yang bisa diringkas sebagai berikut: Jabatan-jabatan yang berkaitan dengan keagamaan, perang, penerimaan dan pengeluaran, pasar, kota, pelabuhan laut, negara, sidang pengadilan, catatan-catatan kontrak, pelaksanaan hukuman, penjagaan tahanan, audit dan *scrutinies*, serta pertanggungjawaban majelis hakim. Yang terakhir, adalah jabatan-jabatan yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan publik dari negara. Sekali lagi, ada tiga jabatan berdasarkan arahan majelis hakim tertinggi yang dipilih di negara tertentu, yakni para penegak hukum, *probuli*, dan *councilors*. Dari semua ini, para penegak hukum bersifat aristokratikal, *probuli* bersifat oligarkis, dan *council* merupakan sebuah institusi demokratis.<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm. 309-311.